



**PENYUSUNAN KAJIAN
KEBIJAKAN MATA RANTAI
DAN POLA DISTRIBUSI
PADA KOMODITAS
PANGAN PENYUMBANG
INFLASI DI KOTA
PONTIANAK**

**LAPORAN
AKHIR**



2022

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	6
1.3. Target/ Sasaran	7
1.4. Manfaat.....	7
1.5. Referensi Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pengertian Inflasi.....	9
2.2. Teori Inflasi.....	10
2.3. Jenis - Jenis Inflasi	15
2.3.1. Menurut Penyebab Inflasi.....	15
2.3.2. Menurut Tingkat Keparahan Inflasi	19
2.3.3. Berdasarkan Asal Timbulnya inflasi	20
2.3.4. Berdasarkan Cakupan Pengaruh Kenaikan Harga	20
2.3.5. Jenis Inflasi Lainnya	21
2.4. Dampak Inflasi	22
2.5. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Inflasi.....	24
2.6. Kebijakan Pengendalian Inflasi.....	26
BAB III GAMBARAN UMUM.....	30
3.1. Aspek Geografi dan Demografi	30
3.1.1. Letak Geografis dan Batas Administratif.....	30
3.1.2. Topografi.....	30
3.1.3. Luas Wilayah (km ²).....	33
3.1.4. Klimatologi.....	34
3.2. Aspek Kependudukan.....	36
3.3. Peruntukan Lahan	37
3.3.1 Lahan Pertanian.....	37
3.3.2 Luas Pertanian Sawah.....	38
3.4. Gambaran karakteristik perekonomian Kota Pontianak.....	39
3.4.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)	39
3.4.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	39
3.4.3 Realisasi Pendapatan	40
3.4.4 Ekspor.....	41
BAB IV METODE PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	42
4.1 Metode Penelitian	42
4.1.1. Pengumpulan Data	42

4.1.2. Lokasi Kegiatan dan waktu penelitian.....	43
4.2 Teknik Analisis Data	43
<i>BAB V POLA INFLASI</i>	<i>45</i>
5.1 Analisis mengenai perkembangan inflasi dan pola inflasi.....	45
5.2 Analisis inflasi berdasarkan kelompok komoditas	46
5.3 Analisis peta inflasi berdasarkan kelompok komoditas	48
5.4 Analisis peta dan pola inflasi berbasis komoditas.....	55
<i>BAB VI POLA PERDAGANGAN DAN JALUR DISTRIBUSI KOMODITAS UTAMA PENYUMBANG INFLASI.....</i>	<i>63</i>
6.1. Pola Distribusi dan Jalur Perdagangan Daging Sapi.....	63
6.2. Pola Distribusi dan Jalur Perdagangan Ayam Ras.....	64
6.3. Pola Distribusi dan Jalur Perdagangan Telur Ayam Ras.....	66
6.4. Pola Distribusi dan Jalur Perdagangan Beras.....	69
6.5. Pola Distribusi dan Jalur Perdagangan Cabe Rawit.....	71
6.6. Pola Distribusi dan Jalur Perdagangan Bawang Merah.....	72
<i>BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</i>	<i>75</i>
7.1 Kesimpulan	75
7.2 Rekomendasi.....	75
<i>DAFTAR PUSTAKA.....</i>	<i>77</i>

BAB I PENDAHULUAN

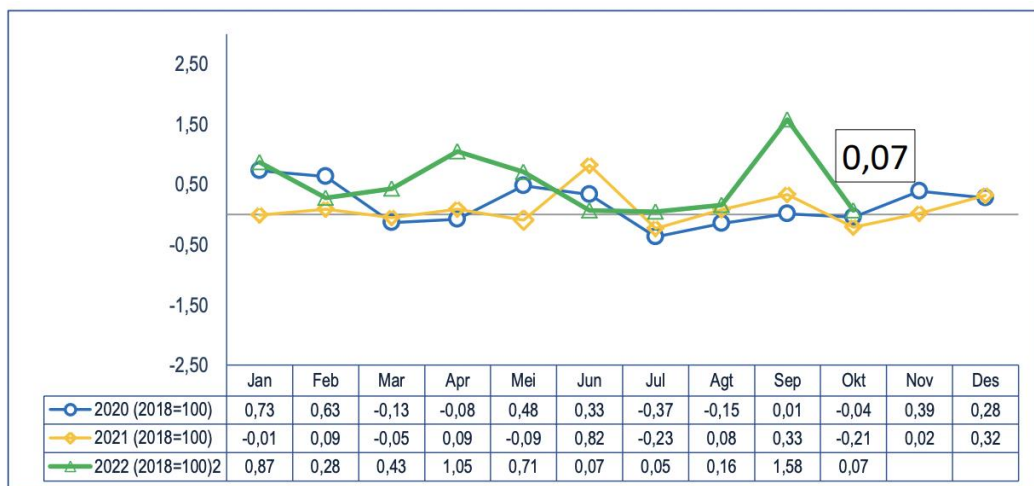
1.1. Latar Belakang

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*). Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*Administered Price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Sedangkan faktor penyebab *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya.

Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, diminta untuk mengendalikan inflasi guna mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, mendukung kelancaran distribusi, serta stabilitas perekonomian di daerah. Provinsi Kalbar dengan menindaklanjuti himbauan Mendagri terkait pengendalian inflasi di daerah bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar dan melakukan pengawasan harga komoditas di pasar-pasar yang ada di Prov Kalbar.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kota Pontianak sebagai salah satu kota yang menjadi sampel penghitungan inflasi nasional, memberikan pengaruh andil cukup besar terhadap capaian inflasi Provinsi Kalimantan Barat mengingat jumlah penduduk yang lebih besar dan jumlah pusat pemasaran baik tradisional maupun modern yang lebih banyak

dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat. Sampai dengan akhir tahun 2022, inflasi Kalimantan Barat diperkirakan tetap berada pada rentang sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar $3\pm 1\%$ (yoy). Meskipun capaian inflasi Kota Pontianak selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun beberapa komoditas pangan perlu menjadi perhatian dikarenakan frekuensinya lebih sering muncul dan memberikan andil inflasi yang cukup besar. Optimalisasi upaya menjaga stabilitas inflasi tidak hanya mengawasi kenaikan harga dan ketersediaan komoditas pangan, namun pemerintah daerah juga perlu waspada terhadap kelancaran distribusi perdagangan komoditas pangan. Berikut ini adalah perkembangan inflasi tahunan di kota Pontianak.



Sumber : BPS Kota Pontianak

Gambar 1.1 Perkembangan Inflasi Kota Pontianak 2020-2022

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Agustus) 2022 sebesar 3,67 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2022 terhadap Agustus 2021) sebesar 4,13 persen. ² Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada tujuh kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks dari yang tertinggi yaitu kelompok transportasi sebesar 1,13 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,71 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,47 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar

0,43 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,08 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,84 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,48 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,23 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen. Berikut ini inflasi Kota Pontianak menurut kelompok pengeluaran dari tahun 2019 hingga 2021.

Tabel 1.1 Inflasi Kota Pontianak Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran baru (2019)	Inflasi Kota Pontianak (Persen)		
	2019	2020	2021
Makanan, Minuman, Tembakau	0.99	5.17	0.79
Pakaian dan Alas Kaki	0.20	-0.22	0.09
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.11	0.67	0.71
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.08	0.50	1.99
Kesehatan	0.39	5.26	0.48
Transportasi	0.16	-1.30	1.68
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.04	-0.65	0.05
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0.00	0.82	2.87
Pendidikan	0.14	0.92	0.53
Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran	0.16	2.93	1.85
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0.22	1.98	4.07
Umum	2.64	2.11	1.16

Sumber: BPS Kota Pontianak

Inflasi yang terjadi di Kota Pontianak masih di dominasi oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, pada tahun 2020 terjadi tingkat inflasi sebesar 5.17 persen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Agustus 2022 adalah: air kemasan, mobil, bahan bakar rumah tangga, cumi-cumi, kangkung, sepeda motor, mie, daging sapi, wortel, dan buku tulis

bergaris. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga pada Agustus 2022 adalah: daging ayam ras, bawang merah, tomat, cabai rawit, bioskop, ikan kembung, sawi hijau, minyak goreng, semangka, dan bayam.

Distribusi perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani produksi dan konsumsi dalam penyaluran komoditas dari produsen sampai ke konsumen. Pendistribusian komoditas tersebut berkaitan erat dengan peran dari pedagang perantara, baik pedagang besar maupun pedagang eceran, sebagai penghubung antara produsen dan konsumen sehingga terbentuk rantai distribusi perdagangan yang terdiri dari produsen, pedagang perantara, dan konsumen akhir.

Rantai distribusi mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat karena melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan proses kegiatan ekonomi suatu wilayah. Dari rantai yang terbentuk dapat digambarkan pola distribusi perdagangan yang merupakan rangkaian jalur perpindahan suatu barang mulai dari produsen sampai ke konsumen akhir pada suatu wilayah tertentu. Pola distribusi yang efisien mampu menggerakkan suatu barang dari produsen ke konsumen dengan biaya yang seminimal-mimalnya, sehingga mampu memberikan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan disertai harga barang yang terjangkau bagi konsumen akhir.

Terjadinya fluktuasi dan disparitas harga barang pokok antar daerah yang cukup tinggi, ditengarai sebagai akibat dari pola distribusi perdagangan bahan kebutuhan pokok masyarakat yang masih bermasalah. Untuk menggambarkan permasalahan tersebut, penting untuk dilakukan Kajian Mata Rantai dan Pola Distribusi pada beberapa komoditas terpilih sehingga pola distribusi setiap komoditas di kota pontianak dapat digambarkan.

Komoditas yang dicakup dalam kajian ini sebanyak 6 jenis, yaitu: daging sapi, ayam ras, telur, cabe merah, ikan, bawang merah. Perubahan indeks harga konsumen (inflasi) di Kota Pontianak dari bulan ke bulan selama tahun 2021 cenderung berfluktuatif. Di Kota Pontianak komoditas Pertanian,

Perternakan dan Perikanan sebagai penyumbang yang cukup signifikan untuk inflasi, antara lain Bawang Merah, Cabe Merah, Kangkung dan Ketimun, Cumi – cumi, Ikan Gembung, Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras. beberapa komoditas yang cukup banyak menyumbang inflasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Komoditas Penyumbang Inflasi di Kota Pontianak 2022

No	Komoditas	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Jumlah	
		I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D
1	Beras						√		√					√		-	3
2	Cabe Rawit		√		√				√			√		√		2	3
3	Cabe Merah Kering	√														1	-
4	Cabe Merah		√	√		√			√	√		√				4	2
5	Kangkung	√			√	√					√	√			√	3	3
6	Sawi Hijau		√				√	√		√			√		√	2	4
7	Bayam							√			√				√	1	2
8	Ketimun		√		√	√			√		√		√		√	3	4
9	Wortel						√		√							-	2
10	Kol Putih											√				1	-
11	Buncis											√		√		-	2
12	Kacang Panjang				√									√		-	2
13	Bawang Merah			√		√			√	√		√		√		5	1
14	Bawang Putih									√		√		√		-	2
15	Tomat				√	√				√						2	1
16	Anggur			√							√					1	1
17	Semangka								√			√				1	1
18	Pepaya										√					-	1
19	Daging Ayam Ras	√		√			√		√	√			√		√	4	2
20	Daging Sapi						√			√						-	2
21	Daging Babi		√							√						1	1
22	Telur Ayam Ras	√			√		√	√		√		√	√	√		5	3
23	Cumi-cumi	√		√			√	√				√		√		3	3
24	Ikan Gembung		√	√							√	√	√			2	3
25	Ikan Tongkol		√		√											-	2
26	Ikan Manyung		√													-	1
27	Udang Basah		√				√					√				-	3

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak

Dari tabel 1.2 jika diambil pembobotan dengan skor > 3 penyumbang inflasi pada komoditas Pertanian yaitu Bawang Merah, Cabe Merah, Kangkung dan Ketimun, untuk komoditas Peternakan penyumbang inflasi terbesar adalah Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras, Di komoditas Perikanan penyumbang inflasi adalah Cumi – cumi dan Ikan Gembung. Sedangkan Penyumbang deflasi dengan skor > 3 penyumbang deflasi adalah Beras Cabe Rawit dan Sawi Hijau. Di komoditas Perikanan penyumbang deflasi Udang Basah. Sektor Pertanian terutama tanaman Hortikultura menjadi golongan yang cukup banyak menyumbang inflasi di Kota Pontianak

Pada bulan agustus 2022 komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi daging sapi sebesar 0,0188 persen, sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi daging ayam ras sebesar 0,1273 persen, cabe rawit sebesar 0,0342 persen. Dalam hal ini 6 komoditas ini memberikan andil terhadap pergerakan inflasi yang ada di Kota Pontianak. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan gambaran pola distribusi perdagangan dalam negeri sebagai acuan dibangunnya sistem distribusi perdagangan yang lebih efisien. Selain itu, margin perdagangan dan pengangkutan total pendistribusian komoditas yang diteliti mulai dari produsen sampai ke konsumen akhir dapat diperoleh.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Kajian Kebijakan Mata Rantai Dan Pola Distribusi Pada Komoditas Pangan Penyumbang Inflasi Di Kota Pontianak adalah :

1. Merumuskan langkah-langkah identifikasi pola perdagangan dan jalur distribusi komoditas-komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Pontianak;
2. Merumuskan langkah-langkah sistematis yang meliputi tahapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan bagi penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak dengan sasaran akhir stabilisasi harga komoditas pangan di Kota Pontianak;
3. Menyusun dokumen kajian kebijakan mata rantai dan pola distribusi pada komoditas pangan penyumbang inflasi di Kota Pontianak yang dapat dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan ekonomi daerah dalam rangka stabilisasi harga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan dari Penyusunan Kajian Kebijakan Mata Rantai Dan Pola Distribusi Pada Komoditas Pangan Penyumbang Inflasi Di Kota Pontianak adalah :

1. Dimilikinya rumusan langkah-langkah identifikasi pola perdagangan dan jalur distribusi komoditas-komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Pontianak;
2. Dimilikinya rumusan langkah-langkah sistematis yang meliputi tahapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan bagi penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak dengan sasaran akhir stabilisasi harga komoditas pangan di Kota Pontianak;
3. Tersedianya pedoman dan arah kebijakan dalam meningkatkan koordinasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam pengendalian inflasi Kota Pontianak.

1.3. Target/ Sasaran

Target/Sasaran yang ingin dicapai Penyusunan Kajian Kebijakan Mata Rantai Dan Pola Distribusi Pada Komoditas Pangan Penyumbang Inflasi Di Kota Pontianak ini adalah terciptanya kondisi perekonomian Kota Pontianak yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, memberikan stabilitas harga bagi masyarakat dan para pelaku usaha, memberikan pedoman serta arah kebijakan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menyelenggarakan program pengendalian inflasi.

1.4. Manfaat

Manfaat dari Penyusunan Kajian Kebijakan Mata Rantai Dan Pola Distribusi Pada Komoditas Pangan Penyumbang Inflasi Di Kota Pontianak adalah :

1. Memberikan rumusan langkah-langkah identifikasi pola perdagangan dan jalur distribusi komoditas-komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Pontianak;
2. Memberikan rumusan langkah-langkah sistematis yang meliputi tahapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan bagi penguatan

- peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak dengan sasaran akhir stabilisasi harga komoditas pangan di Kota Pontianak;
3. Memberikan pedoman dan arah kebijakan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan koordinasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam pengendalian inflasi Kota Pontianak.

1.5. Referensi Hukum

Penyusunan Kajian Kebijakan Mata Rantai Dan Pola Distribusi Pada Komoditas Pangan Penyumbang Inflasi Di Kota Pontianak ini harus mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan, dan tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
4. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak 2020-2024;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 100);

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan indikator penting dan tolok ukur perekonomian yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi makro. Secara umum, inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum (*agregat*) dan terjadi secara terus menerus (Suseno dan Astiyah, 2009). Secara lebih operasional, Badan Pusat Statistik mendefinisikan inflasi sebagai angka gabungan dari perubahan harga kelompok komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan dianggap mewakili seluruh komoditas barang dan jasa yang dijual di pasar. Berdasarkan dua definisi tersebut, maka kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Terminologi “terus menerus” mengindikasikan bahwa kenaikan harga yang terjadi karena faktor musiman (menjelang hari-hari besar atau kenaikan harga sekali saja dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) juga tidak dapat disebut inflasi.

Tingkat inflasi biasanya diukur dengan menggunakan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu mengindikasikan pergerakan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Tingkat inflasi yang diukur berdasarkan IHK dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran sesuai dengan *The Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP) (Badan Pusat Statistik, 2015). Selain berdasarkan COICOP, Badan Pusat Statistik juga mengelompokkan berdasarkan pengelompokan yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor-faktor yang bersifat fundamental. Disagregasi inflasi dikelompokkan menjadi inflasi inti dan inflasi non inti. Inflasi Inti yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental,

seperti interaksi permintaan dan penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen (Badan Pusat Statistik, 2015). Sementara itu, inflasi non inti cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain 10 faktor fundamental. Inflasi non inti terdiri dari dua komponen yaitu inflasi komponen bergejolak dan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (Badan Pusat Statistik, 2015). Sejak tahun 2014 penghitungan inflasi berdasarkan dari IHK disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2012=100 dengan jumlah paket komoditas inflasi inti sebanyak 751 komoditas, untuk inflasi harga diatur pemerintah dan inflasi bergejolak masing-masing sebanyak 23 komoditas dan 85 komoditas.

2.2. Teori Inflasi

Boediono (2001) menjelaskan, terdapat berbagai macam teori yang berusaha untuk menjelaskan inflasi dari berbagai sudut pandang. Teori tersebut, antara lain Teori Kuantitas Uang, Keynesian Model, Mark-up Model dan Teori Struktural.

1. Teori Kuantitas Uang

Teori Kuantitas Uang adalah teori yang menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Teori ini juga dikenal sebagai teori kaum moneteris (*monetarist theory*). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut:

- a) Inflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume uang yang beredar (apakah berupa penambahan uang kartal atau penambahan uang giral tidak menjadi soal) dalam perekonomian. Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar, kejadian seperti misalnya, kegagalan panen hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang ibarat “bahan bakar” bagi inflasi. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi

akan berhenti dengan sendirinya, walau apapun sebab awal kenaikan harga tersebut.

b) Laju inflasi juga dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga pada masa yang akan datang. Ada 3 kemungkinan keadaan yang dapat terjadi yaitu:

- Keadaan *pertama* adalah bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Dalam hal ini, sebagian besar dari penambahan jumlah uang yang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk menambah likuiditasnya. Ini berarti bahwa sebagian besar dari kenaikan jumlah uang tersebut tidak dibelanjakan untuk pembelian barang sehingga tidak ada kenaikan harga barang-barang (atau harga-harga mungkin naik sedikit sekali).
- Keadaan yang *kedua* adalah dimana masyarakat (atas dasar pengalaman dibulan-bulan sebelumnya) mulai sadar bahwa ada inflasi. Orang-orang mulai mengharapkan kenaikan harga. Penambahan jumlah uang yang beredar tidak lagi diterima oleh masyarakat untuk menambah pos kasnya, tetapi akan digunakan untuk membeli barang-barang (memperbesar pos aktiva *barang-barang* didalam neraca). Hal ini dilakukan karena orang-orang berusaha untuk menghindari kerugian yang timbul seandainya mereka memegang uang kas. Kenaikan harga (inflasi) tidak lain adalah suatu "pajak" atas saldo kas yang dipegang masyarakat, karena uang semakin tidak berharga. Dan orang-orang berusaha menghindari "pajak" ini dengan jalan menggunakan saldo kasnya menjadi barang. Orang secara perseorangan bisa melakukan penyesuaian dalam neracanya seperti ini, yaitu dengan jalan membelanjakan

uang kasnya untuk membeli barang-barang. Akibat selanjutnya adalah naiknya harga barang-barang tersebut. Bila masyarakat mengharapkan harga-harga untuk naik dimasa mendatang sebesar laju inflasi di bulan-bulan yang lalu, maka kenaikan jumlah uang beredar akan sepenuhnya diterjemahkan menjadi kenaikan permintaan akan barang-barang, dalam hal ini kenaikan jumlah uang sebesar misalnya, 10%, akan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang sebesar 10% pula. Keadaan seperti ini biasanya dijumpai pada waktu inflasi sudah berjalan cukup lama, dan orang-orang mempunyai cukup waktu untuk menyesuaikan sikapnya terhadap situasi yang baru.

- Keadaan yang *ketiga* terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiper inflasi. Samuelson dan Nordhaus (2001), mengatakan bahwa dalam keadaan ini orang-orang sudah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Keenganan untuk memegang uang kas dan keinginan membelanjakan untuk membeli barang seperti uang kas tersebut diterima ditangan menjadi semakin meluas di kalangan masyarakat. Orang-orang cenderung mengharapkan keadaan semakin memburuk; laju inflasi untuk bulan-bulan mendatang diharapkan menjadi semakin besar dibandingkan dengan laju inflasi dibulan-bulan sebelumnya. Keadaan ini ditandai oleh makin cepatnya peredaran uang (*velocity of circulation* yang naik). Dalam keadaan ini kenaikan jumlah uang yang beredar, misalnya 20% akan mengakibatkan kenaikan harga-harga lebih besar dari 20%. Hiper inflasi menghancurkan bukan hanya sendi-sendi ekonomi moneter tetapi juga sendi-sendi sosial politik dari suatu masyarakat. Struktur

masyarakat yang baru akan timbul menggantikan struktur yang lama.

2. Keynesian Model

Dasar dari terciptanya model inflasi Keynes ini adalah bahwa inflasi terjadi karena masyarakat menginginkan kehidupan di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa efektif (permintaan agregat) mengalami peningkatan melebihi jumlah komoditas yang tersedia (penawaran agregat) di pasar, akibatnya terjadi *inflationary gap* pada perekonomian tersebut. Ketidakmampuan pasar dalam mencukupi permintaan barang dan jasa oleh masyarakat terjadi karena dalam jangka pendek sangat sulit untuk memenuhi kenaikan permintaan agregat tersebut.

3. Mark-up Model

Teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Teori ini mendasarkan pemikiran bahwa inflasi ditentukan oleh dua komponen, yaitu *cost of production* dan profit margin. Dengan demikian, ketika terjadi kenaikan biaya produksi akan menyebabkan turunnya keuntungan yang didapat oleh perusahaan, yang berdampak kepada kenaikan harga jual komoditas di pasar.

Proses inflasi menurut pandangan ini tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulah apa yang disebut dengan *inflationary gap*). *Inflationary gap* ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana

untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana.

4. Teori Struktural

Teori ini merupakan cerminan teori inflasi yang terjadi pada negara-negara berkembang. Teori struktural menganggap inflasi bukan semata-mata fenomena moneter saja, melainkan juga merupakan fenomena struktural. Teori ini menekankan pada kekakuan harga dan struktur perekonomian negara berkembang. Terkait dengan perekonomian regional hal ini murni disebabkan oleh struktur perekonomian dan kekakuan harga pada masing-masing wilayah. Oleh karenanya fenomena inflasi yang muncul akibat perbedaan struktur perekonomian wilayah sering menjadi suatu permasalahan jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek. Menurut teori ini penyebab terjadi kekakuan dan kesenjangan struktural pada perekonomian negara berkembang adalah sebagai berikut:

- a) Supply dari sektor pertanian tidak elastis. Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pengejaran sektor pertanian yang masih menggunakan metode dan teknologi yang sederhana, sehingga seringkali terjadi supply dari sektor pertanian tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaannya.
- b) Cadangan valuta asing yang terbatas (kecil) akibat dari pendapatan ekspor yang lebih kecil daripada pembiayaan impor. Keterbatasan cadangan valuta asing ini menyebabkan kemampuan untuk mengimpor barang-barang baik bahan baku maupun barang modal sangat dibutuhkan untuk pembangunan menjadi terbatas pula. Akibat dari lambatnya pembangunan sektor industri, seringkali menyebabkan laju pertumbuhan supply barang tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan permintaan.

Pengeluaran pemerintah terbatas. Hal ini disebabkan oleh sektor penerimaan rutin yang terbatas, yang tidak cukup untuk membiayai pembangunan, akibat timbulnya defisit anggaran belanja, sehingga seringkali menyebabkan dibutuhkanya pinjaman luar negeri. Apabila pinjaman luar negeri sulit untuk didapat, maka pada umumnya defisit anggaran dibiayai melalui percetakan uang (*printing of money*).

2.3. Jenis – Jenis Inflasi

Menurut Nopirin (2009) dan Sukirno (2011) inflasi dapat dibedakan berdasarkan penyebab, tingkat keparahan, dan asal timbulnya inflasi. Penjelasan dari masing – masing golongan inflasi tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini.

2.3.1. Menurut Penyebab Inflasi

Berdasarkan teori kuantitas, dijelaskan bahwa sumber utama terjadinya inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan (*demand*) sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah banyak. Dalam teori ini sumber inflasi dibedakan menjadi dua, yaitu *cost-push inflation* dan *demand-pull inflation*.

2.3.1.1. Cost-push Inflation

Cost-push inflation biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Keadaan ini timbul akibat adanya penurunan dalam penawaran total (*aggregate supply*) sebagai konsekuensi kenaikan biaya produksi. Apabila keadaan tersebut berlangsung cukup lama, maka akan terjadi inflasi yang disertai dengan resesi ekonomi. Gambar 2.1 menjelaskan bagaimana *cost-push inflation* terjadi. Akibat kenaikan biaya produksi, kurva *supply* bergeser dari S_1 ke S_2 dan harga naik dari P_1 ke P_2 dan jumlah barang yang diperjualbelikan turun dari Q_1 menjadi Q_2 . Bila kenaikan harga ini terus terjadi maka akan mengakibatkan inflasi (*cost- push Inflation*).

Dengan asumsi *ceteris paribus*, pergeseran kurva penawaran tersebut akan *menurunkan* produksi, sehingga mendorong terjadinya peningkatan harga dari P1 menuju P2. Kenaikan biaya produksi ini dapat timbul karena beberapa faktor diantaranya:

- i. Upah. Peningkatan upah yang disebabkan oleh keberhasiltuntutan serikat buruh atau independen dari permintaan pasar, maka dapat menjadi sumber *cost-push inflation*. Peningkatan upah berarti peningkatan biaya produksi yang dihadapi perusahaan sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan harga jual barang dan jasa di pasar supaya tingkat keuntungan tetap terjaga. Namun hal tersebut dapat dilakukan jika dan hanya jika perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan harga, maka dorongan biaya akan ditanggapi dengan menekan tingkat keuntungan dan menghindari pembengkakan biaya produksi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah produksi sehingga penawaran berkurang dan meningkatkan harga.
- ii. Laba. Beberapa perusahaan memiliki kekuatan untuk meningkatkan harga barang dan jasa di pasar hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan saja. Perusahaan dengan kekuatan tersebut biasanya bersifat monopoli.
- iii. Inflasi barang impor. Bahan baku atau *input* antara untuk memproduksi suatu produk bisa berasal dari luar negeri. Jika harga barang impor tersebut mengalami kenaikan, maka perusahaan akan terdorong untuk meningkatkan harga jual barang dan jasa di pasar atau menurunkan produksinya. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah rasional untuk membayar kenaikan harga bahan baku impor. Inflasi pada barang impor tersebut dapat terjadi

akibat perubahan nilai tukar, perubahan harga komoditas di pasar dunia, dan kejutan eksternal.

- iv. Ketersediaan sumber daya. Saat ketersediaan sumber daya semakin menurun, maka harga sumber daya tersebut akan meningkat. Peristiwa tersebut akan meningkatkan biaya produksi yang dihadapi perusahaan sehingga menggeser kurva penawaran agregat ke kiri dan terjadi peningkatan harga.
- v. Pajak. Salah satu sumber pendapatan pemerintah adalah pajak. Saat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan tingkat pajak tidak langsung, maka perusahaan akan membagi beban pajak yang mereka tanggung kepada konsumen tergantung pada elastisitas harga permintaan dan penawaran produk. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan harga jual produk mereka.

Menurut Lipsey (1995) menyatakan bahwa *cost-push inflation* dapat disebabkan oleh:

- a. *Wage cost-push inflation*. *Wage cost-push inflation* menyatakan bahwa kenaikan yang terjadi pada biaya upah, yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan permintaan merupakan penyebab awal terjadinya inflasi.
- b. *Price-push inflation*. *Price-push inflation* atau juga dikenal dengan istilah *administred price inflation* menyatakan bahwa para produsen mempunyai kekuatan monopoli, dan mereka ingin sekalimenaikkan harga, tetapi karena mereka mengkhawatirkan terjadinya ketidakpercayaan dari pihak pemerintah maka mereka

menggunakan kenaikan dalam biaya produksi yang dapat dijadikan alasan untuk membenarkan terjadinya kenaikan harga.

- c. *Import cost-push inflation*. *Import cost-push inflation* terjadi karena dorongan biaya impor yang merupakan barang yang penting, umumnya bahan baku untuk produksi.
- d. *Structural rigidity inflation*. Menekankan kekakuan struktural, mengasumsikan bahwa sumber-sumber daya tidak dengan cepat beralih dari penggunaan yang satu ke penggunaan yang lain dan adalah mudah untuk menaikkan upah dan harga barang daripada menurunkannya. Mengingat bahwa upah dan harga adalah kaku, maka tidak akan terlihat adanya penurunan upah dan harga pada sektor-sektor yang potensial. Sehingga proses penyesuaian upah dan harga didalam sebuah perekonomian dengan adanya kekakuan struktural menyebabkan munculnya inflasi.

2.3.1.2. *Demand-pull Inflation*

Inflasi jenis ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*aggregate demand*), sedangkan produksi berada pada keadaan yang hampir mendekati atau pada kondisi *full-employment*. Dalam keadaan mendekati *full-employment*, kenaikan permintaan total disamping menaikkan harga dapat juga menaikkan *output*. Dalam

keadaan *full-employment*, kenaikan permintaan selanjutnya hanya akan menaikkan harga saja. Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan kondisi keseimbangan *output* berada di atas atau melebihi *output full-employment* maka akan menimbulkan *inflationary gap*. *Inflationary gap* inilah yang menyebabkan munculnya inflasi (Nophirin, 2009). Menurut golongan *moneteris*, peningkatan permintaan agregat disebabkan oleh ekspansi jumlah uang beredar. Namun, menurut golongan *non moneteris*, peningkatan permintaan agregat dapat terjadi karena konsumen melakukan pengeluaran lebih banyak, peningkatan nilai investasi, peningkatan pengeluaran pemerintah, peningkatan nilai ekspor, dan penurunan nilai impor.

2.3.2. Menurut Tingkat Keparahan Inflasi

Laju inflasi dari suatu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda dapat memiliki tingkat keparahan yang berbeda. Berdasarkan tingkat keparahannya, laju inflasi dapat dibagi ke dalam empat kategori. Penjelasan dari masing – masing kategori dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*). Secara umum *creeping inflation* ditandai dengan laju inflasi yang rendah yaitu kurang dari 10% per tahun. Pada kondisi *creeping inflation*, kenaikan harga berjalan lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.
- b. Inflasi Sedang (*Moderate Inflation*). Kondisi dalam inflasi sedang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (*double digit*) yaitu sebesar 10% sampai dengan 30% per tahun).
- c. Inflasi Berat. Inflasi berat menggambarkan kondisi inflasi dimana

besarnya antara 30% sampai 100% per tahun. Inflasi ini dapat dikatakan ganas karena dampaknya sudah semakin luas dan sulit dikendalikan.

- d. Inflasi Tinggi (*HiperInflation*). Inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Besarnya lebih dari 100% per tahun. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga masyarakat tidak percaya pada uang yang dipegang dan ingin segera ditukarkan dengan barang, sehingga uang berputar dengan cepat.

2.3.3. Berdasarkan Asal Timbulnya inflasi

Menurut asal timbulnya, inflasi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu inflasi berasal dari dalam negeri (*domestik inflation*) dan inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi berasal dari dalam negeri (*domestik inflation*) terjadi misalnya sebagai akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*) yaitu inflasi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

2.3.4. Berdasarkan Cakupan Pengaruh Kenaikan Harga

Menurut cakupan pengaruhnya, inflasi dapat dikategorikan menjadi inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi yang tak terkendali. Jika terjadi kenaikan harga secara umum hanya berkaitan dengan beberapa barang tertentu secara kontinyu maka disebut dengan inflasi tertutup (*closed inflation*). Apabila kenaikan harga terjadi secara keseluruhan maka disebut dengan inflasi terbuka (*open inflation*). Apabila serangan inflasi demikian hebatnya dan setiap saat

harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot maka disebut dengan inflasi yang tidak terkendali (hiperinflasi).

2.3.5. Jenis Inflasi Lainnya

Selain kategori inflasi seperti dijelaskan sebelumnya, ada beberapa jenis inflasi lainnya yang ada dalam perekonomian. Beberapa jenis dan istilah inflasi lainnya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi inti yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan-penawaran, ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen, dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi inflasi seperti nilai tukar, harga komoditas internasional, dan inflasi mitra dagang (inflasi dunia). Inflasi ini cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi.
- b. Inflasi struktural yaitu inflasi yang terjadi akibat kendala atau kekakuan struktural yang menyebabkan penawaran dalam perekonomian menjadi kurang responsif terhadap permintaan yang meningkat. Dampaknya adalah penawaran barang menjadi tidak fleksibel sehingga ketika permintaan meningkat maka harga – harga barang akan meningkat.
- c. Inflasi administrasi (*administered prices*) yaitu jenis inflasi yang banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam mengatur harga. Beberapa komoditas yang dapat dikendalikan harganya melalui kebijakan pemerintah yaitu harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik, tarif angkutan, tarif telepon, biaya kuliah, dan sebagainya.

- d. Inflasi bergejolak, yaitu inflasi barang atau jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak (*volatile*). Volatilitas tersebut dipengaruhi oleh kejutan yang berifat temporer, seperti musim panen, gangguan alam, gangguan penyakit, serta gangguan distribusi. Inflasi ini merupakan inflasi turunan dan bersifat non inti.
- e. Pajak inflasi atau *seigniorage*, yaitu inflasi yang disebabkan karena pemerintah harus mencetak uang baru, sehingga penerimaan pemerintah dari penciptaan uang baru tersebut dapat dianggap sebagai (*seigniorage*), atau merupakan biaya sosial masyarakat karena sebenarnya pemerintah hutang kepada masyarakat untuk membiayai pembangunannya.
- f. Inflasi inersia yaitu terjadinya inflasi di masa lalu yang mempengaruhi ekspektasi inflasi di masa depan, sebab ekspektasi ini mempengaruhi harga serta upah yang ditetapkan.

2.4. Dampak Inflasi

Keberadaan inflasi memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian suatu negara atau daerah. Secara umum, dampak inflasi bagi perekonomian dapat terlihat pada efeknya terhadap distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi, dan produksi nasional (Nopirin, 2009). Pengaruh inflasi terhadap distribusi pendapatan disebut juga dengan *equity effect*, sedangkan terhadap alokasi faktor produksi disebut juga dengan *efficiency effect*. Adapun pengaruh inflasi terhadap produksi nasional disebut juga dengan *output effect*.

- a. Efek terhadap pendapatan (*equity effect*)

Efek pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan dan ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Golongan yang

dirugikan adalah orang-orang yang berpenghasilan tetap, seperti pegawai negeri atau pun pegawai swasta karena mereka menderita kerugian penurunan pendapatan riil dan pihak-pihak yang mendapat keuntungan adalah mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi.

b. Efek terhadap efisiensi (*efficiency effect*)

Inflasi dapat mengubah pola alokasi faktor – faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan terhadap produksi beberapa barang tertentu dengan adanya inflasi, permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Kenaikan produksi barang ini pada gilirannya akan mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi yang sudah ada. Memang tidak ada jaminan bahwa alokasi faktor-faktor produksitu lebih efisien dalam keadaan tidak ada inflasi. Namun kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktorproduksi menjadi tidak efisien.

c. Efek terhadap output (*output effect*)

Inflasi akan dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi dikarenakan dalam keadaan inflasi, kenaikan harga mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Akan tetapi apabila laju inflasi cukup tinggi dapat mengakibatkan keadaan yang sebaliknya, yakni penurunan output.

Selain dampaknya terhadap pendapatan, efisiensi, dan ouput, inflasi

juga memiliki dampak terhadap perdagangan luar negeri dan kesempatan kerja. Inflasi menyebabkan harga barang impor lebih murah daripada harga barang yang dihasilkan di dalam negeri dan kenaikan harga-harga akan menyebabkan barang - barang produksi dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang-barang yang sama di pasaran luar negeri. Inflasi dapat mengakibatkan terjadinya aliran modal keluar dibandingkan aliran modal yang masuk sehingga terjadi penurunan investasi baik dari sisi swasta ataupun pemerintah. Keadaan tersebut akan mengakibatkan pada semakin tingginya angka pengangguran.

2.5. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Inflasi

Secara teoritis, ada beberapa faktor penyebab terjadinya inflasi, yakni inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi (Suseno dan Astiyah, 2009). Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditas yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Tingginya permintaan barang dan jasa dipengaruhi oleh kenaikan daya beli masyarakat, pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, perubahan selera, dan naiknya barang – barang substitusi dari impor. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif

atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (Idul Fitri, Natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari komposisi supply-demand tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

Inflasi yang terjadi di Indonesia juga dipengaruhi oleh siklus tahunan. Siklus tahunan yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan tingginya inflasi, seperti bulan Ramadhan, tahun ajaran baru, dan akhir tahun atau awal tahun. Pada momen tersebut permintaan masyarakat melonjak tajam, sehingga berdampak pada kenaikan harga yang tinggi pula. Sampai saat ini pemerintah tidak memiliki formula yang dapat mengerem laju kenaikan inflasi pada momen tersebut.

Secara lebih spesifik, faktor – faktor yang mempengaruhi inflasi ditunjukkan oleh beberapa penelitian terdahulu. Atmadja (1999) mengemukakan bahwa inflasi disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar, deficit anggaran pemerintah, faktor dalam pengeluaran agregat dan luar negeri. Penelitian Lestari (2003) menunjukkan bahwa jumlah uang beredar dan upah berpengaruh negatif terhadap inflasi, sementara variabel pendapatan perkapita dan impor berpengaruh signifikan positif terhadap inflasi. Penelitian Beirne (2009) menyimpulkan bahwa inflasi inersia, nilai tukar nominal efektif, defisit fiskal, belanja pemerintah, investasi (PMTB), kondisi infrastruktur dan variabel - variabel yang menggambarkan tekanan

inflasi yang berasal dari faktor global (harga minyak, harga pangan, shock nilai tukaran akses uni eropa) berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di negara- negara yang diteliti. Penelitian Priyono dan Setiasih (2009) menunjukkan bahwa penawaran uang M1, kurs tukar Rupiah/dolar Amerika, dan harga minyak mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat inflasi di Purwokerto. Sementara tingkat bunga konsumsi, tingkat tingkat bunga deposito, serta indeks kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan negatif terhadap inflasi di Purwokerto.

Selain penelitian terkait inflasi yang bersifat nasional, beberapa penelitian terkait inflasi regional menunjukkan hasil yang sedikit berbeda. Penelitian Brodjonegoro et. al (2005) menunjukkan bahwa hasil yang didapat ternyata inflasi lebih dipengaruhi determinan non-moneter dengan faktor-faktor yang memengaruhi antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengeluaran rutin pemerintah daerah dan biaya transportasi yang semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi regional. Penelitian Nagayasu (2009) menemukan bahwa inflasi secara signifikan dipengaruhi oleh jumlah uang beredar M1&M2 (berpengaruh positif), kredit (berpengaruh positif), produktivitas (berpengaruh negatif) dan nilai tukar (berpengaruh positif). Penelitian Wimanda (2006) menunjukkan bahwa banyak wilayah di Indonesia yang memiliki keterkaitan inflasi yang tinggi terutama regional pulau Jawa terhadap wilayah lainnya, inflasi regional di Indonesia cenderung divergen dan determinan yang paling memengaruhi inflasi pada perekonomian regional adalah ekspektasi inflasi dan perubahan nilai tukar.

2.6. Kebijakan Pengendalian Inflasi

Secara teoritis, pengendalian inflasi dapat dilakukan meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan sisi penawaran, kebijakan

penentuan harga (Sukirno, 2011; dan Nopirin, 2011). Penjelasan dari masing-masing kebijakan tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

a. Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terkait dengan penerimaan dan pengeluaran Negara. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat melakukan pengaturan tentang pengeluaran dan perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan agregat yang kemudian berdampak pada perubahan harga.

b. Kebijakan moneter

Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi dengan cara mengintervensi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Beberapa instrumen moneter yang dapat digunakan untuk menurunkan tingkat inflasi yaitu dengan menaikkan suku bunga, membatasi kredit, meningkatkan cadangan wajib minimum, dan menjual surat berharga pemerintah.

c. Dasar sisi penawaran

Kebijakan dari sisi penawaran dapat disebut juga dengan kebijakan terkait dengan output. Kebijakan ini meliputi langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi. Ketika penawaran meningkat atau output bertambah, maka harga – harga komoditas dapat diturunkan.

d. Kebijakan Penentuan Harga

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah juga dapat melakukan

kebijakan penetapan harga. Penetapan harga dapat dilakukan dengan kebijakan hargatertinggi (*ceiling price*) atau kebijakan harga terendah (*floor price*). Kebijakan *ceiling price* digunakan untuk melindungi konsumen, sedangkan kebijakan *floor price* untuk melindungi produsen. Dua kebijakan ini dilakukan agar harga – harga cenderung stabil.

Pengendalian inflasi juga tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga peran pemerintah daerah sangat diperlukan. Tidak hanya membutuhkan peran Bank Indonesia, tetapi juga diperlukan peran serta berbagai pihak. Melalui latar belakang tersebut maka dibentuklah Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) adalah suatu kelompok atau tim yang dibentuk khusus untuk mengendalikan inflasi dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan beberapa dinas instansi terkait (Dharma dan Pratomo, 2014). Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan forum koordinasi yang dibentuk oleh Bank Indonesia untuk membantu pencapaian tingkat inflasi dan menjaga tingkat inflasi agar tetap rendah dan stabil. Tujuan dari pembentukan TPID adalah untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam melakukan pemantauan dan upaya pengendalian inflasi daerah dalam rangka pencapaian target inflasi yang ditetapkan guna mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas pada khususnya dan nasional pada umumnya sehingga kestabilan makroekonomi dapat terjaga.

TPID dibentuk pada akhir tahun 2008 lalu guna mendukung pemberlakuan *Inflation Targetting Framework (ITF)* di Indonesia. Sistem kerja yang dilakukan adalah memantau harga, pasokan dan mengantisipasi adanya lonjakan harga. Mekanisme rapat dilakukan triwulanan dan tim ini memberikan masukan berupa ulasan inflasi bulan sebelumnya, perkiraan

untuk bulan berikutnya dan rekomendasi (Bank Indonesia, 2014).Keanggotaan TPID yang terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor BankIndonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog,BUMD, serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasikebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga. Bentuk pengendalian harga yang dilakukan oleh TPID yaitu (Dharma dan Pratomo, 2014):

- a. Operasi Pasar. Yang dimaksud dengan operasi pasar adalah turun langsungnya instansi dan dinas-dinas yang bersangkutan apabila terjadi kenaikan harga-harga barang di pasar.
- b. Perbaikan Distribusi. Perbaikan distribusi dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan barang agar tidak terjadi kelangkaan yang bisa menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Perbaikan distribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran distribusi.
- c. Himbauan atau *Moral Suasion*. Himbauan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepada masyarakat kondisi yang ada sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan barang. Himbauan bisa berupa pemantauan harga di pasar-pasar oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pembentukan Ekspektasi Masyarakat. Pembentukan ekspektasi masyarakat dilakukan dengan cara memberitahu dan mengkomunikasikan target inflasi tahun ini kepada masyarakat. Pemberitahuan ini bisa melalui media massamaupun elektronik.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Aspek Geografi dan Demografi

3.1.1. Letak Geografis dan Batas Administratif

Secara geografis, Kota Pontianak mempunyai beberapa keunikan yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di Indonesia maupun di dunia. Keunikan Kota Pontianak antara lain adalah Kota Pontianak terletak dilintasan garis khatulistiwa, tepatnya berada pada 2° 05' LU – 3° 05' LS dan 108° 30' – 114° 10' BT. Karena terletak di Lintasan Garis Khatulistiwa, maka Kota Pontianak dijuluki sebagai Kota Khatulistiwa atau Kota Equator. Keunikan selanjutnya adalah Kota Pontianak juga dilintasi dan terbelah menjadi tiga (3) daratan oleh dua (2) buah sungai besar yaitu, sungai Kapuas dan sungai Landak. Dari segi Ketinggian, Kota Pontianak berkisar antara 0,10 meter sampai 1,50 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan lahan berkisar 0-2 persen.

Secara administratif wilayah Kota Pontianak berdekatan dengan beberapa pusat pertumbuhan Regional yaitu Batam, Pekanbaru, Natuna, Jakarta, Balikpapan, Pangkalan Bun. Kota Pontianak letaknya juga tidak jauh dari Negara Asean yang cukup berkembang seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Bahkan Kota Pontianak berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia, sehingga menjadi beranda terdepan Negara Indonesia dalam berinteraksi langsung dengan tetangga Malaysia.

3.1.2. Topografi

Berdasarkan aspek topografi wilayah Kota Pontianak merupakan wilayah berupa dataran rendah dengan ketinggian 0,8 m sampai dengan 1,5 m di atas permukaan laut dengan kemiringan tanahnya ± 2 %. sebagai kota yang dilintasi oleh Sungai Kapuas maka Kota Pontianak mempunyai karekter fisik 80% merupakan kawasan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut sungai-sungai yang ada. Siklus air pasang surut pada permukaan Sungai Kapuas terjadi selama 8

- 10 hari setiap tahunnya dan mengandung air asin berkadar tinggi. Sebaliknya pada musim hujan, sebagian besar daerah tepi sungai tergenang air pasang Sungai Kapuas. Di dalam wilayah Kota Pontianak banyak terdapat sungai dan parit yang keseluruhannya berjumlah 71 sungai/parit. Sungai/parit tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan sehari-hari dan sebagai penunjang sarana transportasi. Kondisi tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda.

Tabel 3.1
Sungai/Parit di Kota Pontianak Menurut Kecamatan

Kecamatan	Sungai/Parit	
	Parit	Sungai
Pontianak Selatan	Parit Bansir	Sungai Kapuas Kecil
	Parit Besar	
	Parit Tokaya	
Pontianak Tenggara	Parit Bangka	Sungai Raya
	Parit Haji Husin	
Pontianak Timur	Parit Bating	Sungai Kapuas Kecil
	Parit Daeng Lasibek	Sungai Landak
	Parit Haji Yusuf Karim	Sungai kapitan
	Parit Jepon	Sungai Jenggot
	Parit Kongsi	Sungai Kapuas Besar
	Parit Langgar	
	Parit Mayor	
	Parit Pangeran Pati	
	Parit Semerangkai Tambelan	
	Parit Wan Bakar Kapur	
	Parit H. Yusuf	

	Parit Jalil	
	Parit Norman	
Pontianak Barat	Parit Sungai Kapuas	Sungai Nipah Kuning
	Parit Tengah	Sungai Parit Jawi
	Parit Labala	Sungai Kapuas Besar
		Sungai Sero
		Sungai Beliung
		Sungai Selamat
Pontianak Kota	Parit Besar	Sungai Bangkong
	Parit Sungai Jawi	Sungai Kapuas Besar
	Parit Sungai Kakap	
Pontianak Utara	Parit Jawa	Sungai Kapus Besar
	Parit Makmur	Sungai Landak
	Parit Malaya	Sungai Kuning
	Parit Nanas	Sungai Durhaka
	Parit Pangeran	Sungai Pandan
	Parit Sungai Kunyit	
	Parit Sungai Putat	
	Parit Sungai Sahang	
	Parit Sungai Selamat	
	Parit Wan Salim	
	Parit Pak Kacong	
	Parit Pekong	
	Parit Lie	
	Parit Belanda	
	Parit Cekwa	
Parit Pangeran II		

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka 2020

3.1.3. Luas Wilayah (km²)

Kota Pontianak memiliki luas wilayah mencapai 107,82 km² yang terdiri dari enam (6) kecamatan dan dua puluh sembilan (29) kelurahan yang terbagi menjadi 534 Rukun warga (RW) dan 2.372 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (34,52 persen), Sedangkan kecamatan dengan cakupan wilayah terkecil adalah Kecamatan Pontianak Timur (8,14 persen). Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

1. Bagian Utara : Kecamatan Siantan dan Kabupaten Mempawah
2. Bagian Selatan : Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
3. Bagian Barat : Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
4. Bagian Timur : Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Tabel. 3.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Pontianak Utara	37,22	34,52
2.	Barat	16,47	15,28
3.	Pontianak Kota	15,98	14,82
4.	Pontianak Tenggara	14,83	13,75
5.	Pontianak Selatan	14,54	13,49

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka 2020

Tabel. 3.3
Jumlah kelurahan, RW dan RT di Kota Pontianak

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
-----------	------------------	-----------	-----------

Pontianak Selatan	5	89	399
Pontianak Tenggara	4	43	169
Pontianak Timur	7	71	331
Pontianak Barat	4	95	506
Pontianak Kota	5	120	494
Pontianak Utara	4	116	473
Jumlah	29	534	2.372

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka 2020

3.1.4. Klimatologi

Berdasarkan letak geografis Kota Pontianak yang berada tepat dilalui oleh garis khatulistiwa, menjadikan kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi. Hasil pencatatan dari Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak menunjukkan bahwa pada tahun 2021 temperatur udara minimum di Kota Pontianak mencapai 20,0°C, sedangkan suhu maksimum mencapai 35,6⁰ C, dan rata-rata tekanan udaranya sebesar 1011,0 milibar.. Rata-rata kecepatan angin di Kota Pontianak sebesar 2,3 knot dengan kecepatan angin terbesar terjadi pada Bulan April yaitu sebesar 28 knot. Selama tahun 2021 hari hujan terbanyak terjadi pada Bulan Januari yaitu sebanyak 24 hari dengan curah hujan sebesar 299,7 mm.

Tabel 3.4
Suhu Udara, Kelembaban, dan Tekanan Udara di Kota Pontianak Tahun 2021

Bulan	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Rata-Rata Kelembaban	Rata-Rata Tekanan Udara
Januari	23,1	32,8	26,8	83	1010,2
Februari	21,8	33,8	27,1	79	1011,2
Maret	23,4	34,0	27,3	83	1010,8
April	23,2	34,4	27,8	82	1011,5
Mei	23,1	34,5	28,2	82	1010,2
Juni	23,3	34,5	27,7	82	1011,5
Juli	22,6	35,6	28,2	80	1010,7
Agustus	23,5	34,4	27,0	84	1011,6
September	22,7	34,4	26,9	84	1011,3

Oktober	23,4	35,0	27,9	81	1011,1
November	20,8	33,8	27,3	84	1010,3
Desember	20,8	34,7	27,3	84	1011,25
Rata-Rata	22,6	34,3	27,5	82,3	1011,0

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka 2020

Rata-rata kecepatan angin di kota Pontianak pada tahun 2021 sebesar 2.3 dan arah lebih cenderung ke arah timur. Kemudian kecepatan angin terbesar berada pada bulan april karena curah hujan yang cukup tinggi. Berikut ini rata-rata dan arah arah angin di kota Pontianak pada tahun 2021 pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Kecepatan Angin dan Arah Angin di Kota Pontianak Tahun 2019

Bulan	Rata-Rata Kecepatan Angin	Kecepatan Angin Terbesar	Arah Angin Terbanyak
Januari	1,5	8	Barat
Februari	1,4	6	Timur Laut
Maret	1,8	4	Timur
April	1,4	2	Timur Laut
Mei	1,1	2	Timur Laut
Juni	1,2	5	Selatan
Juli	1,8	5	Selatan
Agustus	1,9	24	Selatan
September	1,6	35	Selatan
Oktober	1,3	24	Selatan
November	1,2	24	Timur
Desember	1,7	22	Timur Laut
Rata-Rata	1,5	25,1	Selatan

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka 2020

Rata-rata curah hujan pada tahun 2021 di Kota Pontianak sebesar 276,96, dan terjadi curah hujan terbesar pada bulan agustus yaitu sebesar 630. Tabel 3.6 menjelaskan tentang jumlah hari hujan dan curah hujan selama tahun 2021.

Tabel 3.6
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kota Pontianak Tahun 2021

Bulan	Jumlah Hari Hujan	Curah Hujan
Januari	24	299,7
Februari	6	11,9
Maret	18	228,9
April	16	264
Mei	20	282
Juni	18	294
Juli	16	207
Agustus	20	630
September	22	444
Oktober	15	285
November	20	214
Desember	15	163
Rata-Rata	17,5	276,96

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka 2022

3.2. Aspek Kependudukan

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu prioritas untuk menangani berbagai isu yang berkembang mengenai tingkat kesejahteraan dan kemajuan pada perekonomian masyarakat. Pembangunan di Kota Pontianak menuntut perhatian dan akselerasi yang optimal untuk menyelesaikan permasalahan yang belum selesai dan merancang kesiapan daerah dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Untuk mengetahui aspek kesejahteraan masyarakat, berikut ini gambaran umum penduduk di Kota Pontianak:

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021

Kecamatan	Penduduk (Ribu)		Laju Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2020	2021
Pontianak Selatan	90839	90921	0,99	0,12
Pontianak Tenggara	49127	49107	1,04	0
Pontianak Timur	105787	107386	2,43	2,02
Pontianak Barat	146700	147851	1,68	1,05
Pontianak Kota	123028	123215	1,09	0,2
Pontianak Utara	143204	145233	2,3	1,89

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel tabel 3.7 Jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2021 sebanyak 663.713 jiwa, dimana untuk setiap kilometer persegi wilayahnya rata-rata dihuni oleh 5.610 jiwa. Kecamatan Pontianak Barat merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu dihuni oleh 9.104 jiwa per km², sedangkan wilayah kecamatan yang kepadatannya paling kecil adalah Kecamatan Pontianak Tenggara dengan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 3.037 jiwa per km².

3.3. Peruntukan Lahan

Secara garis besar lahan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian. Lahan Pertanian dikategorikan lagi menjadi lahan sawah dan bukan sawah (Tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan dan lahan pertanian bukan sawah lainnya). Sedangkan Lahan Bukan Pertanian terdiri dari rumah, bangunan dan halaman sekitarnya, rawa-rawa (yang tidak ditanami), dan lahan bukan pertanian lainnya (jalan, sungai).

3.3.1 Lahan Pertanian

Luas Lahan Pertanian di Kota Pontianak Pada tahun 2017 mencapai 3.663 hektar atau sekitar 34 persen dari total luas wilayah Kota Pontianak. Namun jika

ditinjau lebih jauh menurut kecamatan, maka dapat dilihat bahwa masih terdapat satu kecamatan di Kota Pontianak yang sebagian besar lahannya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian oleh masyarakatnya, yakni Kecamatan Pontianak Utara dengan luas lahan pertaniannya yang mencapai 2.114 hektar atau sebesar 55,7 persen dari total luas wilayah Kecamatan Pontianak Utara.

3.3.2 Luas Pertanian Sawah

Selama tahun 2017, luas lahan baku sawah yang tercatat di Kota Pontianak adalah sebesar 207 hektar atau hanya sebesar 2 persen dari total luas wilayah Kota Pontianak. Hingga saat ini keberadaan lahan sawah di Kota Pontianak masih tersebar hampir di setiap kecamatan, kecuali di Kecamatan Pontianak Selatan. Kecamatan yang memiliki lahan sawah terbesar adalah Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Utara, yakni masing-masing seluas 130 hektar dan 41 hektar.

Tabel 3.8
Luas Lahan Menurut Penggunaan dan Kecamatan di Kota Pontianak (Ha), 2017

Kecamatan	Penggunaan Lahan			Total Luas Wilayah
	Lahan Pertanian Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pontianak Selatan	0	469	977	1.446
Pontianak Tenggara	9	355	1.127	1.491
Pontianak Timur	18	387	473	878
Pontianak Barat	130	57	1.460	1.647
Pontianak Kota	9	115	1.474	1.598
Pontianak Utara	41	2.073	1.608	3.722
Kota Pontianak	207	3.456	7.119	10.782

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak dan BPS Kota Pontianak

3.4. Gambaran karakteristik perekonomian Kota Pontianak

3.4.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)

Pengeluaran Perkapita merupakan salah satu parameter standar hidup layak sekaligus salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditinjau dari besar kecilnya pengeluaran masyarakat. Pengeluaran konsumsi perkapita dilihat berdasarkan dua hal, yakni pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan.

Tabel 3.9
Tabel Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka konsumsi RT per kapita					44,27	44,31

Sumber Data : BPS Kota Pontianak 2021

Tabel 3.10
Tabel Peresentase Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Tahun 2015-2020

	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Konsumsi RT untuk non pangan	54,56	52,70	54.11	57.48	55,73	55,69

Sumber Data : BPS Kota Pontianak 2021

3.4.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak mengalami fluktuatif sejak tahun 2015 hingga 2019, pertumbuhan

ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 5.08 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.11
Pertumbuhan Ekonomi (persentase)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2015	4,99
2016	5,08
2017	4,96
2018	4,22
2019	4,02
2020	-3,96
2021	4,60

Sumber Data : BPS Kota Pontianak 2022

3.4.3 Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Pendapatan Kota Pontianak

	Uraian	2016	2017	2018	2019
I.	Pendapatan Daerah	1418.52	1545.62	1663.14	
I.1	Pendapatan Asli Daerah	389368.7	476050.4	440358.1	480892.23
1	Pajak Daerah	25815	303128	308900	332.139,76
2	Retribusi Daerah	42.016,15	35.657,08	36.039,84	39.515,72
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.532,50	14.662,44	18.322,96	25.059,57
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53.670,01	122.602,89	77.094,50	84.177,17
I.2	Dana Perimbangan	890.541,18	905.713,69	942.558,77	945.027,11
1	Dana Bagi Hasil Pajak	44.061,12	39.616,95	49.414,04	34.458,50
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.549,36	2.334,24	4.372,67	4.401,61
3	Dana Alokasi Umum	711.955,76	699.448,99	699.448,99	726.769,85
4	Dana Alokasi Khusus	131.974,94	164.313,52	189.323,07	179.397,16

I.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	138.606,55	163.858,19	280.287,54	338.039,92
1	Pendapatan Hibah	6.432	6510	64792.32	69043.96
2	Dana Darurat	0	0	0	0
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	125.742,23	149.848,19	198.745,22	211.469.18
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0
5	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5000	7500	16750	52526.84
6	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	1432.32	0	0	0

Sumber Data : BPS Kota Pontianak 2020

3.4.4 Ekspor

Nilai ekspor di Kota Pontianak mengalami penurunan pada tahun 2018 namun mengalami peningkatan pada tahun 2019. Berikut ini kondisi ekspor yang ada di Kota Pontianak pada tahun 2016-2019

Tabel 3.13
Nilai Ekspor Kota Pontianak Berdasarkan Pelabuhan Bongkar Muat

Tahun	Nilai Ekspor
2016	458,176,183
2017	431,287,498
2018	364,441,767
2019	413,502,484

Sumber: Kalbar Satu Data 2020

BAB IV METODE PENELITIAN DAN ANALISA DATA

4.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Kajian Kebijakan Mata Rantai Dan Pola Distribusi Pada Komoditas Pangan Penyumbang Inflasi Di Kota Pontianak. Komoditas yang dicakup dalam kajian ini sebanyak 6 jenis, yaitu : daging sapi, ayam ras, telur, cabai, ikan, bawang merah

4.1.1. Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui survey lapangan dengan mewawancarai beberapa responden dan pihak-pihak terkait menurut aspek kajian serta mengumpulkan data lainnya untuk melengkapi data sebagai dasar analisis. Sumber data primer yang digunakan dalam kajian ini antara lain melalui wawancara, kuesioner, dan observasi langsung.

Survey akan dilakukan sebanyak dua tahap, yakni:

1. Tahap survei pasar untuk mengetahui struktur pasar, pola distribusi dan harga.
2. Tahap selanjutnya adalah survei pelaku ekonomi mulai dari tingkat petani/hulu hingga ke tingkat pemasaran akhir/pengecer/hilir. Survei tahap kedua dilakukan untuk mengetahui kinerja rantai pasok pada setiap barang kebutuhan pokok masyarakat yang dianalisis.

b. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang terkait dengan semua aspek kajian seperti :

1. Badan Pusat Statistik dalam beberapa tahun terbit di Kota Pontianak

2. Bank Indonesia dalam beberapa tahun terbit di Kalimantan Barat.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak
5. Jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4.1.2. Lokasi Kegiatan dan waktu penelitian

Lokasi yang menjadi tempat utama kegiatan di Kota Pontianak dengan meliputi seluruh wilayah administrasi yang menjadi kewenangannya selama kurun waktu 2 bulan

4.2 Teknik Analisis Data

Metode analisis kajian ini adalah menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif mengacu kepada kebutuhan alat analisis yang komprehensif (melibatkan data-data kuantitatif dan dokumen-dokumen analisis deskriptif) mengenai kebijakan mata rantai dan pola distribusi pada komoditas pangan penyumbang inflasi di Kota Pontianak sehingga sesuai dengan tujuan kajian yang dilengkapi dengan informasi pembentukan data; metode perhitungan data; dan kegunaan data. Analisa kuantitatif meliputi pengolahan data yang menggunakan alat-alat uji validitas data dengan arah kebijakan yang bersifat Nasional maupun kebijakan daerah.

Jadwal Kerja Kegiatan Penyusunan Kajian Kebijakan Mata Rantai Dan Pola Distribusi Pada Komoditas Pangan Penyumbang Inflasi Di Kota Pontianak Tahun 2022

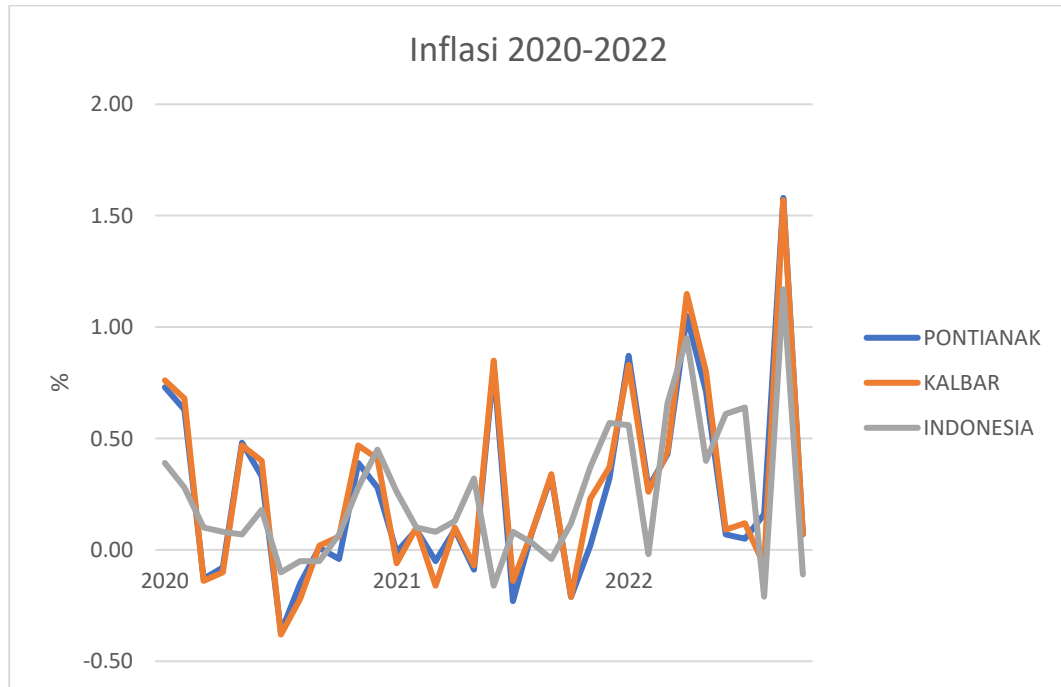
Kegiatan	Okt				Nov					Des
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1
Rapat Penyusunan Kajian Mata Rantai										
Studi Literatur										
Survey Pengumpulan Data dan Informasi Pola Distribusi										
Analisa Hasil Survey										
<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)										
Presentasi Laporan Pendahuluan										
Penyerahan Laporan Pendahuluan										
Penyusunan <i>Draft</i> Dokumen Kajian Kebijakan Mata Rantai Dan Pola Distribusi Pada Komoditas Pangan Penyumbang Inflasi Di Kota Pontianak										
Presentasi Laporan Akhir										
Perbaikan <i>Draft</i> Laporan Akhir										
Final Kajian Kebijakan Mata Rantai Dan Pola Distribusi Pada Komoditas Pangan Penyumbang Inflasi Di Kota Pontianak										
Penyerahan Laporan Akhir										

BAB V POLA INFLASI

5.1 Analisis mengenai perkembangan inflasi dan pola inflasi

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada delapan kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks dari yang tertinggi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,38 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,21 persen; kelompok transportasi sebesar 0,65 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,35 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,13 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,76 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,15 persen. Sementara itu, kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok pendidikan.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Oktober) 2022 sebesar 5,38 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2022 terhadap Oktober 2021) sebesar 5,74 persen. Inflasi pada tahun 2020-2022 di Kota Pontianak masih berada dibawah inflasi provinsi Kalimantan Barat maupun nasional. Pemerintah berupaya mengendalikan inflasi hingga turun terus. Sebab inflasi dan kenaikan harga barang dan jasa menjadi momok bagi semua negara. Kota Pontianak menjadi salah satu kota yang berhasil mengendalikan inflasi. Kota Pontianak melalui TPID Kota Pontianak telah berhasil mengendalikan inflasi. Pada bulan Oktober, kenaikan inflasi tercatat 0,07 persen, artinya meski naik tapi masih terbilang rendah sekali.



Gambar 5.1

Perkembangan Inflasi Kota Pontianak, Kalbar dan Nasional

Sumber : Bank Indonesia, diolah 2022

Tim pengendali inflasi di Kota Pontianak selalu memantau perkembangan komoditas penyumbang inflasi secara langsung di pasar-pasar. Apabila terjadi sedikit peningkatan maka pemerintah langsung bergerak cepat untuk dapat mengendalikan inflasi, seperti melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan rapat teknis TPID, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, melaksanakan gerakan Pencanangan Gerakan Menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.

5.2 Analisis inflasi berdasarkan kelompok komoditas

Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kota Pontianak pada Oktober 2022 terjadi inflasi sebesar 0,07 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 113,10 pada September 2022 menjadi 113,18 pada Oktober 2022.

Tingkat inflasi tahun kalender Oktober 2022 sebesar 5,38 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2022 terhadap Oktober 2021) sebesar 5,74 persen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Oktober 2022 adalah: bensin, bayam, beras, shampo, pasta gigi, jeruk, rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, baju muslim wanita, dan ikan bawal. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga pada Oktober 2022 adalah: cabai rawit, ikan kembung, sawi hijau, udang basah, cabai merah, daging ayam ras, buncis, baju muslim pria, tarif angkutan udara, dan sabun detergen bubuk/cair.

Tabel 5.1
IHK dan Tingkat Inflasi Kota Pontianak Bulan Oktober 2022, Tahun Kalender 2022 dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018 = 100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Okt 2021	IHK Desember 2021	IHK Okt 2022	Tingkat Inflasi Okt 2022 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi Okt 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	107,04	107,40	113,18	0,07	5,38	5,74	0,0700
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110,70	111,33	115,31	-0,76	3,57	4,16	-0,2407
Pakaian dan Alas Kaki	104,70	104,70	104,86	-0,15	0,15	0,15	-0,0073
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,37	102,58	108,35	0,15	5,62	5,84	0,0252
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106,86	107,36	114,28	0,18	6,45	6,94	0,0091
Kesehatan	122,66	122,31	120,94	0,13	-1,12	-1,40	0,0038
Transportasi	103,86	104,10	122,26	0,65	17,44	17,72	0,0898
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,81	99,79	99,68	0,01	-0,11	-0,13	0,0005
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,63	105,14	107,87	0,35	2,60	4,09	0,0062
Pendidikan	106,18	106,18	107,41	0,00	1,16	1,16	0,0000
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	108,31	108,55	112,09	1,21	3,26	3,49	0,0967
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	110,43	111,10	119,69	1,38	7,73	8,39	0,0807

Sumber: BPS Kota Pontianak

Pada Oktober 2022, dari 11 kelompok pengeluaran, 8 kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi, 2 kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi, dan 1 kelompok tidak memberikan andil/sumbangan terhadap deflasi/inflasi Kota Pontianak. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,0807 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,0967 persen; kelompok transportasi sebesar 0,0898 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,0062 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,0091 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,0252 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,0038 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,0005 persen. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,2407 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,0073 persen. Sementara itu, kelompok yang tidak memberikan andil/sumbangan deflasi/inflasi yaitu kelompok pendidikan.

5.3 Analisis peta inflasi berdasarkan kelompok komoditas

Analisis peta inflasi berdasarkan kelompok Komoditas pada bulan Agustus 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok ini pada Oktober 2022 mengalami deflasi sebesar 0,76 persen atau terjadi penurunan indeks dari 116,19 pada September 2022 menjadi 115,31 pada Oktober 2022. Dari 3 subkelompok dalam kelompok ini, semua 2 subkelompok mengalami deflasi, dan 1 subkelompok mengalami inflasi. Subkelompok yang mengalami deflasi yaitu subkelompok makanan sebesar 0,95 persen; dan subkelompok minuman tidak beralkohol sebesar 0,17 persen. Sementara subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok

rokok dan tembakau sebesar 0,52 persen. Kelompok ini pada Oktober 2022 memberikan andil/sumbangan deflasi sebesar 0,2407 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi antara lain cabai rawit sebesar 0,0573 persen; ikan kembung sebesar 0,0552 persen; sawi hijau sebesar 0,0529 persen; udang basah sebesar 0,0390 persen; dan cabai merah sebesar 0,0307 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain bayam sebesar 0,0479 persen; beras sebesar 0,0388 persen; jeruk sebesar 0,0221 persen; rokok kretek filter sebesar 0,0171 persen; dan ikan bawal sebesar 0,0140 persen.

b. Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok ini pada Oktober 2022 mengalami deflasi sebesar 0,15 persen atau terjadi penurunan indeks dari 105,02 pada September 2022 menjadi 104,86 pada Oktober 2022. Dari 2 subkelompok yang ada, 1 kelompok mengalami deflasi dan 1 subkelompok tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok yang mengalami deflasi yaitu subkelompok pakaian sebesar 0,19 persen. Subkelompok yang tidak mengalami perubahan indeks yaitu subkelompok alas kaki. Kelompok ini pada Oktober 2022 memberikan andil/sumbangan deflasi sebesar 0,0075 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi yaitu baju muslim pria sebesar 0,0180 persen; blus wanita sebesar 0,0099 persen; dan sarung sebesar 0,0018 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain baju muslim wanita sebesar 0,0158 persen; gaun anak sebesar 0,0025 persen; dan kemeja pendek anak sebesar 0,0025 persen.

c. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok ini pada Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 0,15 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 108,19 pada September 2022 menjadi 108,35 pada Oktober 2022. Dari 4 subkelompok yang ada, 2 subkelompok yang mengalami inflasi, dan 2 subkelompok tidak mengalami perubahan

indeks. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan sebesar 0,28 persen; serta subkelompok listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,24 persen. Sementara subkelompok yang tidak mengalami perubahan indeks yaitu subkelompok sewa dan kontrak rumah serta subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya. Kelompok ini pada Oktober 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0252 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain bahan bakar rumah tangga sebesar 0,0160 persen; pasir sebesar 0,0085 persen; cat tembok sebesar 0,0019 persen; dan kayu lapis sebesar 0,0011 persen. Sementara itu, komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi antara lain besi beton sebesar 0,0038 persen; dan seng sebesar 0,0002 persen.

d. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok ini pada Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 0,18 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 114,07 pada September 2022 menjadi 114,28 pada Oktober 2022. Dari 6 subkelompok yang ada, 1 subkelompok yang mengalami inflasi, 1 subkelompok yang mengalami deflasi, dan 4 subkelompok tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok furnitur, perlengkapan, dan karpet sebesar 1,70 persen. Subkelompok yang mengalami deflasi yaitu subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin sebesar 0,08 persen. Sementara itu, subkelompok yang tidak mengalami perubahan indeks yaitu subkelompok tekstil rumah tangga; subkelompok peralatan rumah tangga; subkelompok barang pecah belah dan peralatan makan minum; serta subkelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun. Kelompok ini pada Oktober 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0091 persen. Komoditas yang dominan

memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain lemari pakaian sebesar 0,0071 persen; pengharum cucian/pelembut sebesar 0,0068 persen; kursi sebesar 0,0050 persen; pembasmi nyamuk elektrik sebesar 0,0022 persen; dan pembasmi nyamuk bakar sebesar 0,0014 persen. Sementara itu, komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi antara lain sabun detergen bubuk/cair sebesar 0,0131 persen; pembersih lantai sebesar 0,0014 persen; dan pembasmi nyamuk cair sebesar 0,0007 persen.

e. Kesehatan

Kelompok ini pada Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 0,13 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 120,78 pada September 2022 menjadi 120,94 pada Oktober 2022. Dari 4 subkelompok yang ada, 1 subkelompok yang mengalami inflasi, dan 3 subkelompok yang tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 0,32 persen. Subkelompok yang tidak mengalami perubahan indeks yaitu subkelompok jasa rawat jalan; subkelompok jasa rawat inap; serta subkelompok jasa kesehatan lainnya. Kelompok ini pada Oktober 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0038 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu vitamin sebesar 0,0038 persen; obat sakit kepala sebesar 0,0002 persen; dan alat KB lainnya sebesar 0,0002 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi antara lain obat gosok sebesar 0,0003 persen.

f. Transportasi

Kelompok ini pada Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 0,65 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 121,47 pada September 2022 menjadi 122,26 pada Oktober 2022. Dari 4 subkelompok yang ada, 2 subkelompok yang mengalami inflasi, 1 subkelompok yang mengalami deflasi, dan 1 subkelompok yang tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok yang

mengalami inflasi yaitu subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 1,15 persen; serta subkelompok pembelian kendaraan sebesar 0,30 persen. Subkelompok yang mengalami deflasi yaitu subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 0,60 persen. Sementara itu, subkelompok yang tidak mengalami perubahan indeks yaitu subkelompok jasa pengiriman barang. Kelompok ini pada Oktober 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0898 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain bensin sebesar 0,0694 persen; solar sebesar 0,0062 persen; pelumas/oli mesin sebesar 0,0062 persen; sepeda motor sebesar 0,0055 persen; mobil sebesar 0,0054 persen; dan pemeliharaan/ service sebesar 0,0047 persen. Sementara itu, komoditas yang dominan memberikan andil/ sumbangan deflasi antara lain tarif angkutan udara sebesar 0,0132 persen.

g. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok ini pada Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 0,01 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 99,67 pada September 2022 menjadi 99,68 pada Oktober 2022. Dari 3 subkelompok yang ada, 1 subkelompok yang mengalami inflasi, dan 2 subkelompok tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok peralatan informasi dan komunikasi. Subkelompok yang tidak mengalami perubahan indeks yaitu subkelompok layanan informasi dan komunikasi; serta subkelompok jasa keuangan. Kelompok ini pada Oktober 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0898 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain laptop/notebook sebesar 0,0001 persen. Sementara itu, tidak ada komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi.

h. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Kelompok ini pada Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 0,35 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 107,49 pada September 2022 menjadi 107,87 pada Oktober 2022. Dari 4 subkelompok yang ada, 1 subkelompok yang mengalami inflasi, dan 3 subkelompok yang tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah sebesar 0,75 persen. Sementara itu, subkelompok barang rekreasi lainnya dan olahraga; subkelompok subkelompok layanan kebudayaan; serta subkelompok layanan rekreasi dan olahraga tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok ini pada Oktober 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0062 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu tas sekolah sebesar 0,0053 persen; pulpen/bollpoint sebesar 0,0009 persen; dan kertas HVS sebesar 0,0001 persen. Sementara itu, tidak ada komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi.

i. Pendidikan

Kelompok ini pada Oktober 2022 tidak mengalami perubahan indeks yaitu sebesar 107,41 jika dibandingkan dengan bulan September 2022. Dari 4 subkelompok yang ada, 4 subkelompok tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok tersebut yaitu subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini; subkelompok pendidikan menengah; subkelompok pendidikan tinggi; serta subkelompok pendidikan lainnya. Kelompok ini pada Oktober 2022 tidak memberikan andil/sumbangan inflasi maupun deflasi. Tidak ada komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi maupun deflasi.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Kelompok ini pada Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 1,21 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 110,75 pada September 2022 menjadi 112,09 pada Oktober 2022. Subkelompok di dalam kelompok ini yaitu jasa pelayanan makanan dan minuman mengalami inflasi sebesar 1,21 persen. Kelompok ini pada Oktober 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0967 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain ikan bakar sebesar 0,0134 persen; teh siap saji sebesar 0,0119 persen; dan bakso siap santai sebesar 0,0118 persen. Sementara itu, tidak ada komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi.

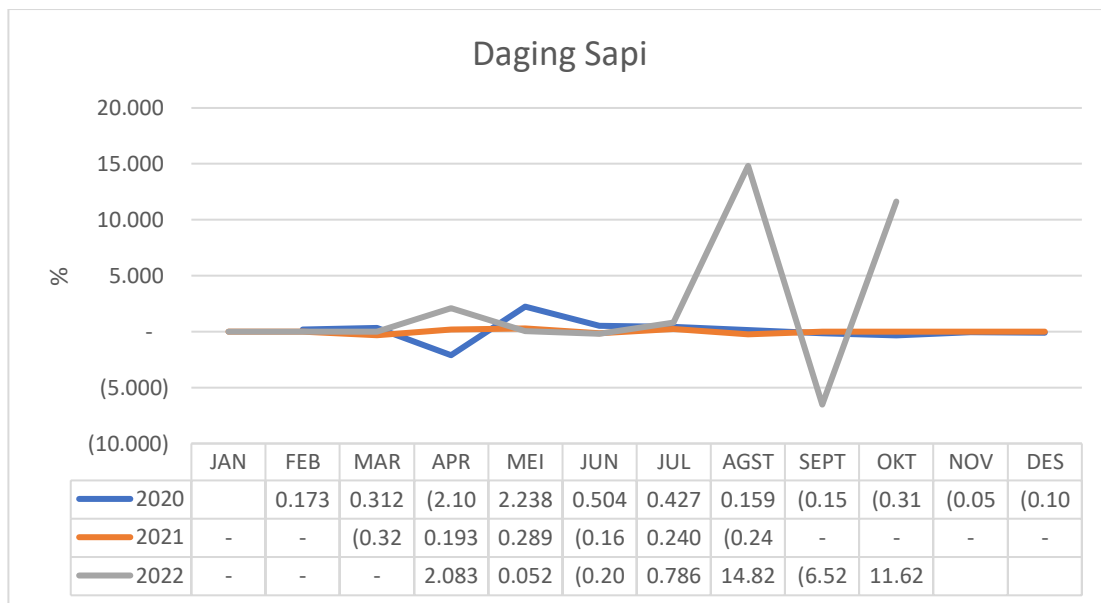
k. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok ini pada Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 1,38 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 118,06 pada September 2022 menjadi 119,69 pada Oktober 2022. Dari 3 subkelompok yang ada, 2 subkelompok yang mengalami inflasi, dan 1 subkelompok tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok perawatan pribadi sebesar 1,75 persen dan subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 0,22 persen. Sementara subkelompok jasa lainnya tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok ini pada Oktober 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0807 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain shampo sebesar 0,0324 persen; pasta gigi sebesar 0,0225 persen; krim wajah sebesar 0,0085 persen; popok seklai pakai/diapers sebesar 0,0069 persen; dan pembalut wanita sebesar 0,0066 persen. Sementara itu, komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi antara lain emas perhiasan sebesar 0,00890 persen; dan sabun mandi cair sebesar 0,0058 persen.

5.4 Analisis peta dan pola inflasi berbasis komoditas

1. Daging Sapi

Kebutuhan pangan di Pontianak semakin lama semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya harga bahan pokok seperti daging sapi, Perkembangan harga daging sapi di Kota Pontianak pada Tahun 2020-2022 sebagai berikut:



Gambar 6.1

Perkembangan Daging Sapi di Kota Pontianak

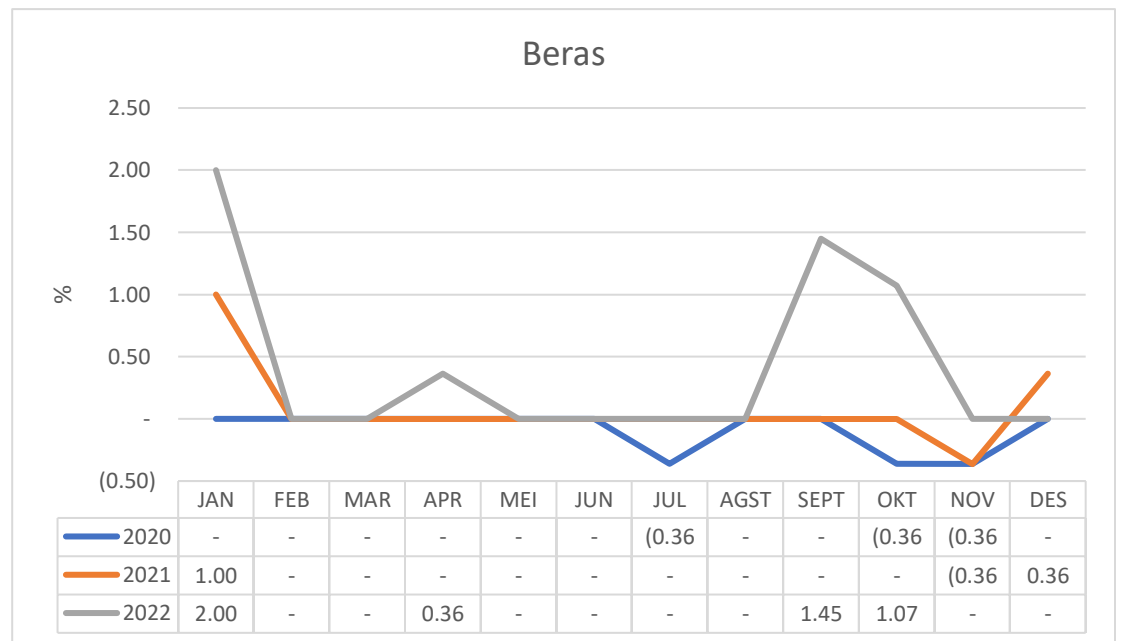
Sumber: Bank Indonesia, data diolah 2022

Rata-rata harga daging sapi berada pada harga Rp.130.000/kg, namun terjadi peningkatan yang sangat tinggi pada bulan agustus dan oktober tahun 2022 sebesar 14,82% dan 11,62%. Terjadi kenaikan pada daging sapi disebabkan karena stok daging mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya PMK pada sapi sehingga ada kebijakan pemerintah dalam membatasi daging impor dari pulau Jawa pada Juli dan Agustus 2022. Mencegah terjadinya penyebaran kepada hewan lainnya,

pemerintah meminta dinas terkait untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar dilakukan karantina terhadap hewan ternak yang masuk dari luar.

2. Beras

Komoditas beras merupakan komoditas yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan komoditas beras mulai tahun 2020-2022 berfluktuatif cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan, berikut ini perkembangannya:



Gambar 6.2

Perkembangan Beras di Kota Pontianak

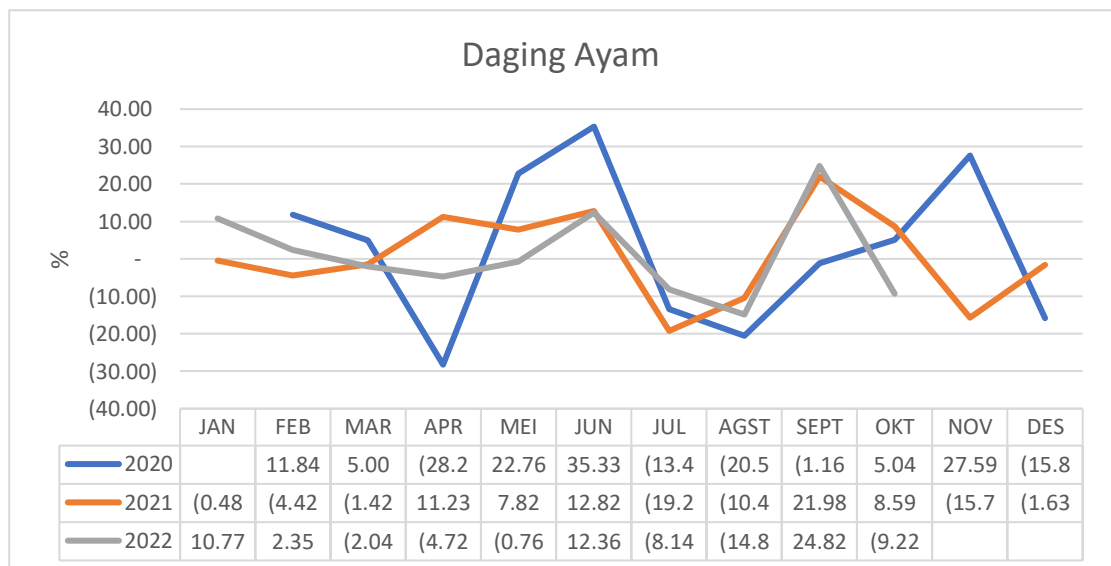
Sumber: Bank Indonesia, data diolah 2022

Harga beras di Kota Pontianak relatif stabil setiap bulannya. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada bulan September dan Oktober akibat dari meningkatnya biaya angkut. Rata-rata harga beras selama 3 tahun terakhir berkisar Rp. 13.840. Pengendalian harga juga

dapat dikendalikan oleh bulog dengan ketersediannya stock beras yang ada. Tidak terdapat indikasi tekanan harga karena faktor hari agama, seperti datangnya bulan puasa dan Idul Fitri dalam perilaku harga beras ini. Faktor musim tanam dan panen beras maupun kendala dalam penyediaan beras diperkirakan lebih menjadi sebab dari inflasi komoditas beras. Terkait upaya menekan tingkat inflasi, fokus utama pengambil kebijakan perlu memperhatikan ketersediaan atau stok beras di pasar dari bulan Mei sampai bulan Februari tahun berikutnya, khususnya setiap menjelang akhir tahun.

3. Daging ayam

Perkembangan harga daging ayam di Kota Pontianak pada Tahun 2020-2022 sebagai berikut:



Gambar 6.3

Perkembangan Beras di Kota Pontianak

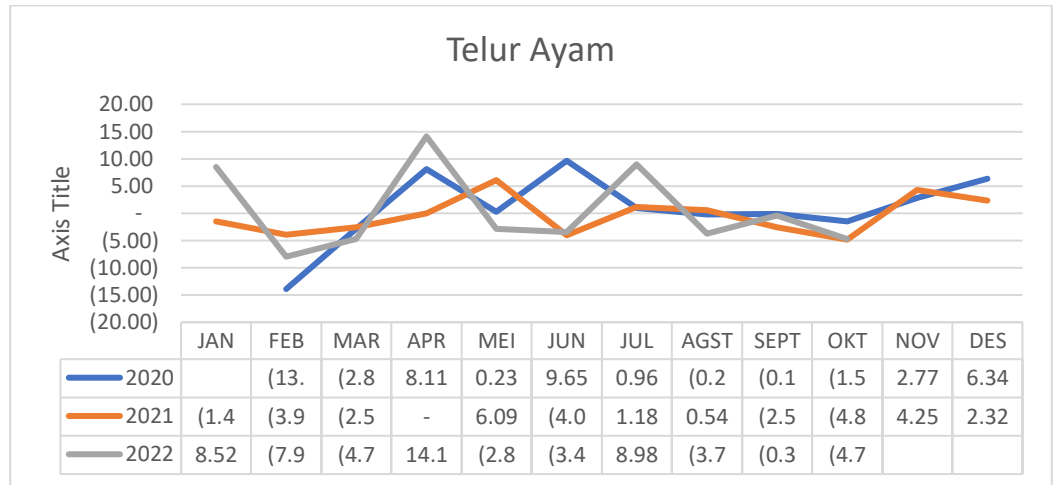
Sumber: Bank Indonesia, data diolah 2022

Rata-rata harga daging ayam di Kota Pontianak berada pada harga Rp.30.000/kg. terjadi peningkatan yang sangat drastis pada bulan juni pada setiap tahunnya, namun pergerakan harga daging ayam sangat fluktuatif setiap bulannya.

Pola kenaikan dan penurunan harga pada beberapa bulan tertentu yang terjadi di setiap tahun tersebut diperkirakan lebih karena faktor permintaan masyarakat. Efek dari demand pull inflation cenderung lebih mendominasi daripada sisi supply side inflation. Dalam hal ini, kenaikan harga cenderung lebih disebabkan karena pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan gangguan dari aktivitas produksi (seperti karena faktor musim, penyakit pada ayam, masalah upah, dan sebagainya). Dengan demikian, dalam pengambilan kebijakan untuk penanganan inflasi, pemerintah daerah perlu mendeteksi pola konsumsi ini. Upaya untuk lebih memopulerkan komoditas substitutif, seperti komoditas hasil perikanan, bisa menjadi alternatif untuk menekan belanja konsumsi daging ayam ras. Namun demikian, metode penyiapan dan penyimpanan stok komoditas menjadi tidak dimungkinkan karena sifat produk daging ayam ras yang tidak tahan lama.

4. Telur Ayam

Telur ayam ras termasuk komoditas yang perlu dicermati dalam pengambilan kebijakan sabilisasi inflasi. Perkembangan harga telur ayam di Kota Pontianak pada Tahun 2020-2022 seabagi berikut:



Gambar 6.4

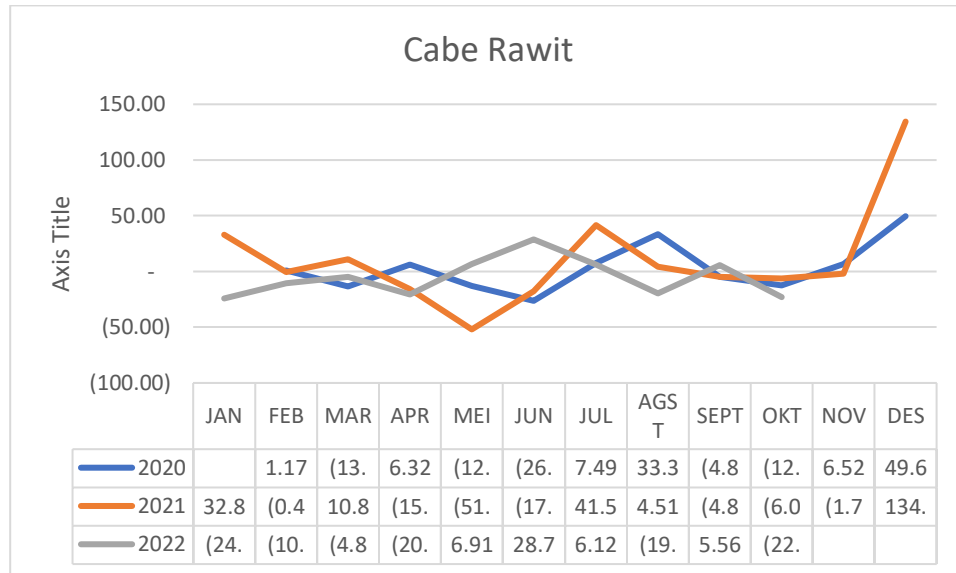
Perkembangan Telur Ayam di Kota Pontianak

Sumber: Bank Indonesia, data diolah 2022

Rata-rata harga telur ayam di Kota Pontianak sebesar 26.550/kg, pergerakan harga telur ayam sangat fluktuatif setiap bulannya. Terjadi lonjakan harga yang tinggi pada bulan-bulan tertentu. Terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi pada April tahun 2022 sebesar 14.10%. Pola perubahan harga komoditas ini relatif mirip dengan pola inflasi komoditas daging ayam ras. Perbedaannya terletak pada inflasi di bulan Juni, di mana pada bulan tersebut harga telur ayam cenderung menurun

5. Cabe Rawit

Perkembangan harga cabe rawit di Kota Pontianak pada Tahun 2020-2022



Gambar 6.5

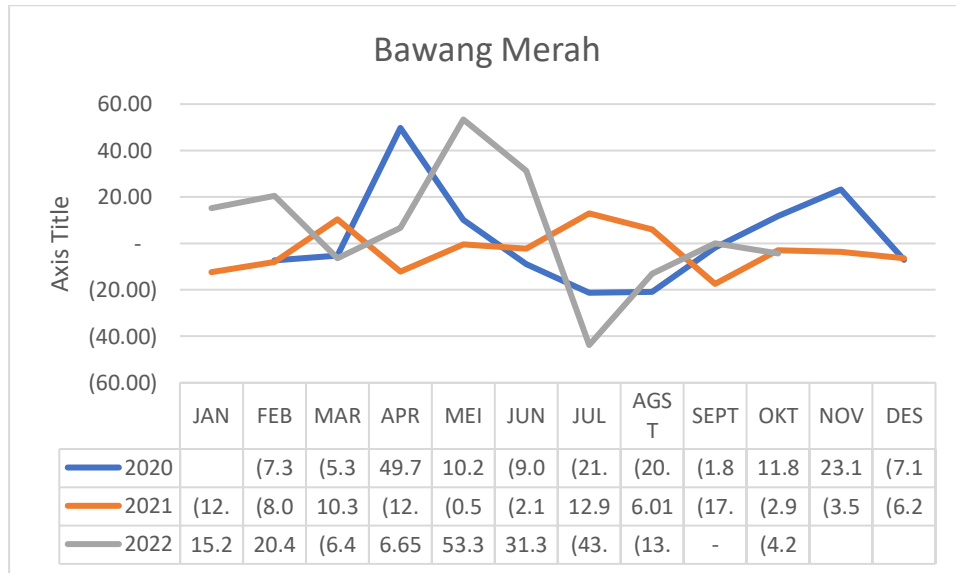
Perkembangan Cabe Rawit di Kota Pontianak

Sumber: Bank Indonesia, data diolah 2022

Rata-rata harga cabe rawit di Kota Pontianak sebesar 73.500/kg. terjadi harga yang begitu fluktuatif setiap bulannya, terjadi peningkatan harga yang sangat tinggi pada bulan desember 2021 sebesar 134.5%. Faktor supply side diperkirakan menjadi penyebab gangguan harga di tingkat ritel. Efek gangguan cuaca kerap memberikan dampak penting bagi ketersediaan pasokan bahan pangan komoditas cabai rawit ini. Sebagaimana komoditas daging dan bawang merah, manajemen penyimpanan menjadi sulit dilakukan oleh produsen dari tingkat petani cabai merah sampai ritel karena faktor daya tahan simpan produk yang hanya dapat bertahan maksimal 1 bulan. Oleh karena itu pasokan komoditas cabe rawit sering tidak seimbang antara pasar konsumsi akhir dengan kuantitas pasokan dari produsen.

6. Bawang Merah

Perkembangan harga bawang merah di Kota Pontianak pada Tahun 2020-2022 sebagai berikut:



Gambar 6.5

Perkembangan Bawang Merah di Kota Pontianak

Sumber: Bank Indonesia, data diolah 2022

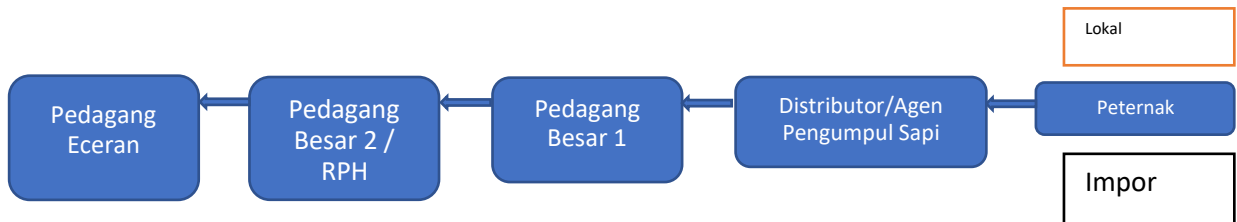
Harga rata-rata bawang merah di Kota Pontianak sebesar 37.200/kg. pergerakan harga bawang merah bergerak fluktuatif namun masih sangat kecil terjadi peningkatan harganya. Pola fluktuasi harga bawang merah di Kota Pontianak diperkirakan juga terjadi di daerah-daerah lain di Kalimantan Barat. Penyebab pertama produsen utama dari bawang merah di Kota Pontianak berasal dari luar kota dan pulau jawa yang menyebabkan adanya ketergantungan yang besar dari daerah daerah luar Pontianak terhadap produksi bawang merah Pontianak. Karena sifat komoditas yang tidak cukup lama, stabilitas panen di Brebes diperkirakan memberikan efek penting pada ketersediaan stok bawang merah di pasar.

Disamping itu, pola distribusi dari distributor besar bawang merah sampai ke tingkat ritel diperkirakan juga berperan dalam stabilitas pasokan di pasar. Setiap gangguan pada stabilitas stok bawang tersebut akan memberikan efek penting kenaikan harga bawang merah.

BAB VI POLA PERDAGANGAN DAN JALUR DISTRIBUSI KOMODITAS UTAMA PENYUMBANG INFLASI

6.1. Pola Distribusi dan Jalur Perdagangan Daging Sapi

Sapi yang berasal dari peternak lokal atau pulau jawa akan disalurkan melalui agen pengumpul sapi maupun langsung kepada Pedagang Besar I. Agen pengumpul sapi merupakan individu/lembaga yang meyalurkan sapi kepada Pedagang Besar I. Dari Pedagang Besar I, sapi dibawa ke RPH untuk proses pemotongan. Setelah proses pemotongan dan pemisahan daging sapi, maka proses pendistribusian selanjutnya kepada Pedagang Besar II maupun langsung kepada konsumen akhir yang transaksinya dilakukan di pasar.



Gambar 6.1
Rantai Distribusi Daging Sapi

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Masih sedikitnya yang berada pada pedagang besar 1, maka harga dapat dikendalikan oleh pedagang tersebut dan pemerintah daerah. Adanya wabah penyakit PMK pada sapi diantisipasi oleh daging beku agar ketersediaan daging sapi masih mampu mengimbangi permintaan daging sapi di Kota Pontianak. Ketersediaan daging sapi di Kota Pontianak masih mampu mengcover permintaan konsumen, namun menurunnya sedikit stock yang ada menyebabkan sedikit peningkatan harga daging sapi.

Kebutuhan daging yang cukup besar di pasaran lokal khususnya untuk kawasan kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat selama ini membuat

para pemasok tidak bisa mengandalkan ketersediaan daging segar karena jumlahnya sangat terbatas.

Agro Boga Utama Pontianak telah mengambil peranan penting sebagai penjaga mata rantai distribusi daging yang didatangkan langsung dari Jakarta. Jalur distribusi Agro Boga Utama Pontianak melalui pintu import pun dibuka dengan memasok daging beku jenis kerbau dari India dan jenis sapi dari Australia. Disamping itu, bulog juga mengambil peran untuk menjaga distribusi daging sapi dan mengendalikan harga daging sapi agar tetap aman. Berikut ini neraca surplus ketersediaan daging sapi di Kota Pontianak:

Tabel 6.1

Neraca surplus ketersediaan Daging Sapi di Kota Pontianak Tahun 2022

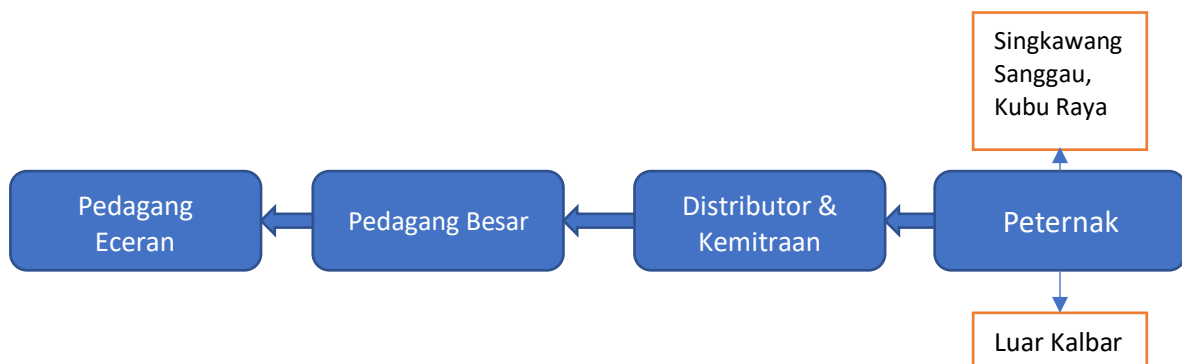
Bulan	Daging Sapi (Ton)
Januari	29,94
Februari	29,28
Maret	32,48
April	87,30
Mei	28,48
Juni	29,29
Juli	31,39
Agustus	31,15
September	29,42
Oktober	15,78

Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Pontianak

6.2. Pola Distribusi dan Jalur Perdagangan Ayam Ras

Komoditas daging ayam ras dimulai dari pemeliharaan atau pembesaran DOC (anak ayam/day old chicks) yang membutuhkan waktu kurang lebih 35 hari. Pembesaran atau produksi ayam ras pedagang di Kota Pontianak relatif sedikit.

Untuk pemenuhan kebutuhan ayam ras pedagang di Kota Pontianak harus mendatangkan ayam ras dari kabupaten sekitar seperti Kabupaten Sanggau dan Kota Singkawang. Pemeliharaan ayam ras seluruhnya menggunakan sistem kemitraan dimana produsen atau peternak hanya bermodalkan tenaga kerja dan tempat pemeliharaan sedangkan untuk DOC, pakan dan vaksin disediakan oleh perusahaan mitra. Sebagai bagian dari kontrak lainnya, peternak wajib menjual ayam kepada perusahaan mitra. Setelah ayam di beli oleh perusahaan kemitraan, kemudian dijual lagi ke pedagang besar dengan kapasitas besar kemudian dijual lagi ke pedagang eceran dimana pedagang menerima ayam hidup kemudian dipotong untuk dijual kepada konsumen. Berikut ini adalah jalur distribusi dari daging ayam ras di Kota Pontianak:



Gambar 6.2
Rantai Distribusi Daging Ayam Ras
Sumber : Data Primer, diolah 2022

Perusahaan kemitraan tidak memiliki kandang sendiri, setelah dilakukan transaksi dengan peternak, kemudian dilanjutkan transaksi dengan pedagang besar. Berikutnya pedagang besar mengambil ayam langsung dari peternak. Pedagang besar ada yang memiliki kandang untuk menyimpan ayam dan ada pula yang diambil dari peternak dan langsung didistribusikan ke pedagang eceran. Adapun pedagang besar yang memiliki kandang karena melakukan pembelian

yang cukup besar dan tidak habis didistribusikan dalam sekali waktu ke pedagang eceran. Berikut ini neraca surplus Daging Ayam di Kota Pontianak selama tahun 2022:

Tabel 6.2
Neraca surplus ketersediaan Daging Ayam di Kota Pontianak Tahun 2022

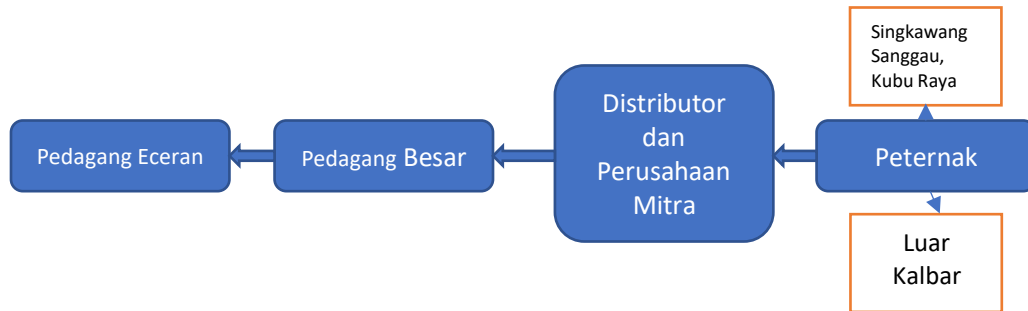
Bulan	Daging Ayam
Januari	129,61
Februari	133,76
Maret	136,58
April	226,09
Mei	136,25
Juni	140,71
Juli	142,09
Agustus	143,86
September	140,22
Oktober	137,84

Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Pontianak

6.3. Pola Distribusi dan Jalur Perdagangan Telur Ayam Ras

Komoditas telur ayam ras dimulai dari pemeliharaan atau pembesaran DOC (anak ayam/day old chicks) yang membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan sampai ayam siap bertelur. Budidaya ayam ras petelur di Kota Pontianak relatif sedikit. Untuk pemenuhan kebutuhan telur ayam ras di Kota Pontianak harus mendatangkan telur ayam ras dari kabupaten sekitar seperti Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau dan Kota Singkawang. Budidaya ayam ras petelur hampir seluruhnya menggunakan sistem kemitraan dimana produsen atau peternak hanya bermodalkan tenaga kerja dan tempat pemeliharaan sedangkan untuk DOC, pakan dan vaksin disediakan oleh perusahaan mitra. Sebagai bagian dari kontrak lainnya, peternak wajib menjual telur ayam kepada perusahaan mitra. Setelah telur di beli oleh perusahaan kemitraan, kemudian dijual lagi ke pedagang besar dengan kapasitas besar kemudian dijual lagi ke pedagang eceran

yang langsung dijual kepada konsumen. Berikut ini adalah jalur distribusi dari telur ayam ras di Kota Pontianak:



Gambar 6.3
Rantai Distribusi Telur Ayam

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Perusahaan kemitraan yang ada di Kota Pontianak kemudian melakukan Kerjasama dengan peternak yang ada di Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang dan Kabupaten Sanggau. Dari telur yang dihasilkan oleh peternak kemudian dibeli kembali oleh perusahaan kemitraan yang kemudian dijual kembali ke pedagang besar yang ada di Kota Pontianak kemudian dijual kembali di pedagang eceran di Kota Pontianak. Kenaikan harga telur ayam ras mirip seperti daging ayam ras yaitu disebabkan karena kenaikan harga dari supplier dan penurunan stok barang. Harga ditentukan dengan harga paling tinggi yang mampu diterima oleh konsumen dan dengan melihat harga dari pesaing. Berikut ini neraca surplus ketersediaan telur ayam di Kota Pontianak:

Tabel 6.3
Neraca surplus ketersediaan Telur Ayam di Kota Pontianak Tahun 2022

Bulan	Telur Ayam
Januari	154,79
Februari	143,52
Maret	191,61
April	434,18
Mei	162,31
Juni	209,51
Juli	198,73
Agustus	215,09
September	140,22
Oktober	84,83

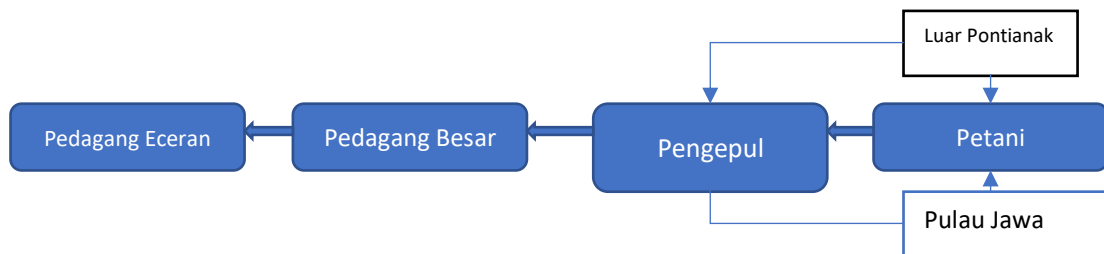
Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Pontianak

Kenaikan harga daging ayam ras, telur ayam dan daging sapi lebih disebabkan karena harga yang meningkat dari supplier dan kelangkaan barang. Harga ditentukan berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan seperti biaya angkut dan biaya potong kemudian ditambahkan keuntungan yang diinginkan. Permasalahan pada rantai distribusi daging ayam ras di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Praktek oligopoli perusahaan kemitraan ayam ras pedaging
2. Penyakit ayam yang mempengaruhi proses produksi (tingkat kematian ayam yang tinggi)
3. Panjangnya rantai distribusi
4. Beban pengangkutan dari produsen ke pedagang besar
5. Beban risiko penyimpanan di pedagang besar dan pedagang eceran karena membutuhkan pakan.

6.4. Pola Distribusi dan Jalur Perdagangan Beras

Kota Pontianak merupakan salah satu kota di Kalimantan Barat yang bukan merupakan wilayah penghasil beras. Maka harga beras di Kota Pontianak lebih dipengaruhi oleh faktor pasokan dan rantai distribusi beras. Untuk mencermati rantai distribusi beras di Kota Pontianak bisa dilihat pada gambar 6.4 berikut ini:



Gambar 6.4
Rantai Distribusi Beras

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Petani yang menghasilkan gabah tidak berasal dari Kota Pontianak, tetapi dari kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Kubu raya dan sekitarnya kemudian juga berasal dari Pulau Jawa. Dari petani, gabah atau beras dijual ke pengepul atau pemilik rice mill. Dari pengepul kemudian beras dijual ke pedagang besar yang memiliki gudang. Dari pedagang besar kemudian dijual langsung ke pedagang eceran yang ada di pasar atau kios dan warung yang berhubungan langsung dengan konsumen, namun ada pula dari pedagang besar masih dijual ke pedagang besar lainnya yang selanjutnya dijual lagi ke pedagang eceran.

Hasil identifikasi rantai distribusi beras menunjukkan bahwa pembentukan harga di tingkat konsumen akhir cenderung dipengaruhi oleh panjangnya rantai distribusi dan biaya pengangkutan yang tinggi sebagai akibat dari rantai distribusi yang panjang. Dari para pelaku usaha komoditas beras, margin terbesar terdapat pada transaksi antara pedagang besar ke pedagang eceran. Kenaikan harga beras cenderung disebabkan karena pasokan, distribusi dan harga yang dari supplier/pedagang besar. Kenaikan harga yang terjadi biasanya kisaran 5-10

persen dan akan saling berimbis dari masing masing rantai distribusi. Harga beras kemudian ditentukan berdasarkan harga tertinggi yang dapat diterima oleh pasar, selain itu harga juga ditentukan dengan melihat harga dari pesaing. Selanjutnya akan diidentifikasi permasalahan pada rantai distribusi beras di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Adanya praktek Oligopoli oleh pedagang besar
2. Beras tidak berasal dari Kota Pontianak
3. Panjangnya rantai distribusi
4. Beban pengangkutan dari produsen ke pedagang besar yang berada pada wilayah yang berbeda

Ada perusahaan yang memasok komoditas dengan 1 brand yang perusahaan lain tidak diperkenankan memasok brand beras tersebut, sehingga brand beras tersebut dapat di tentukan oleh perusahaan tersebut. Berikut ini pedagang besar dan stok komoditas beras yang ada di Pontianak:

Tabel 6.4

Nama Perusahaan dan Stock Komoditas Beras di Kota Pontianak

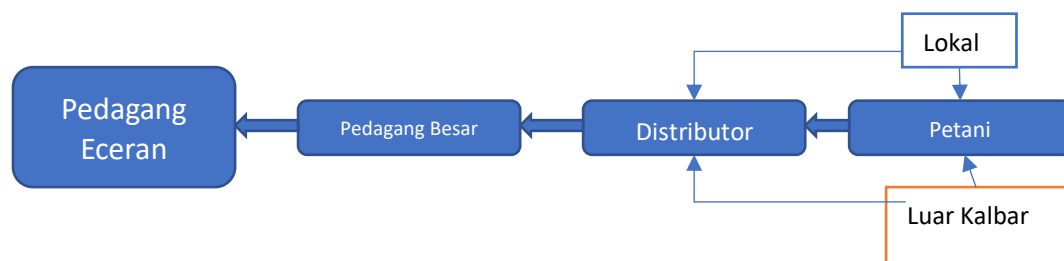
NO	NAMA PERUSAHAAN	STOK AWAL	PENGADAAN	PENYALURAN	STOK AKHIR
1	PD. MAHKOTA	143	95	109	129
2	PT. WIJAYA SUMBER LESTARI	552	310	312	550
3	ERA JAYA	520	535	520	535
4	PD. BRANTAS	327	463	360	430
5	SENTOSA BARU 21	7	8	7	8
6	CV. CAHAYA PANGAN	93	100	78	115
7	CV. GEMILANG BINTANG UTAMA	289	699	737	251
8	CV. SERAYOE	327	463	334	456
9	SETIA MANDIRI	40	60	40	60
10	LESTARI MENTARI MAKMUR	50	60	40	70
11	PT. KAPUAS LESTARI	365	418	487	295
13	KHATULISTIWA JAYA	160			160

14	AGRO ABADI	3274	1963	1615	3622
15	CV. SUMBER INDAH LESTARI	180	76	150	106
16	CV. DUNIA KHATULISTIWA	26	96	90	32
17	PT. LESTARI NIAGA KHATULISTIWA	271	0	215	56
18	SENTOSA BARU	156	17	19	154
19	CV. BUNAKEN	1	3	3	1
20	CV. ARTHA TUNGGAL PERKASA	1862,98	4999,0	1196,50	1166,38
21	TUNAS BARU	35	60	40	55
22	CV. MAKMUR BERSAUDARA	458	209	274	394
23	CV. DUTA UTAMA ADITYA	365	1311	1356	319
24	PT. DUTA PANGAN MANDIRI	365	1311	1356	319
25	SINAR BORNEO	40	20	30	30

Sumber : diskumdag Pontianak

6.5. Pola Distribusi dan Jalur Perdagangan Cabe Rawit

Cabe rawit di Kota Pontianak dihasilkan dari Kabupaten Kubu Raya dan di Pulau Jawa. Para produsen sangat tergantung pada pembelian oleh pedagang besar. Komoditas ini selanjutnya akan dipasarkan dan dikirimkan ke pedagang besar lainnya dan ke eceran oleh para pedagang tersebut. Berikut ini adalah jalur distribusi dari bawang merah di Kota Pontianak:



Gambar 6.5

Rantai Distribusi Cabe Rawit

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Untuk cabe rawit, kenaikan harga cenderung dipengaruhi oleh pasokan. Karena model panen cabe adalah dengan cara memanen yang sudah matang maka

stok tidak bisa melimpah dalam sekali panen seperti padi atau bawang merah. Penetapan harga cabe merah dan cabe merah dengan cara menentukan keuntungan yang diinginkan dan memproyeksikan risiko susut atau rusaknya barang.

Permasalahan pada rantai distribusi cabe rawit di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Cabe rawit tidak berasal dari Kota Pontianak
2. Panjangnya rantai distribusi
3. Beban pengangkutan dari produsen ke pedagang besar
4. Beban penyimpanan di pedagang besar dan pedagang pengecer
5. Risiko kerusakan (rusak dan susut) cabe merah yang cukup tinggi

Berikut ini neraca surplus ketersediaan cabe rawit di Kota Pontianak:

Tabel 6.5
Neraca surplus ketersediaan Cabe Rawit di Kota Pontianak Tahun 2022

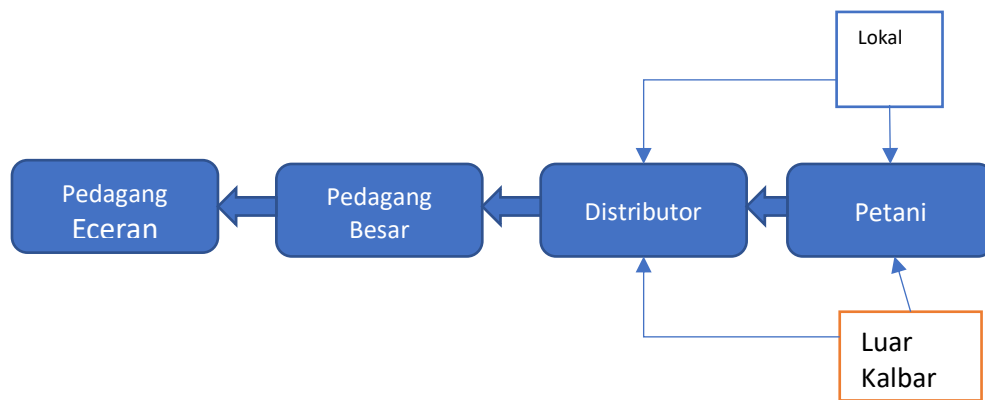
Bulan	Cabe Rawit
Januari	26,49
Februari	25,34
Maret	22,85
April	79,15
Mei	19,78
Juni	15,05
Juli	10,97
Agustus	16,32
September	19,18
Oktober	24,15

Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Pontianak

6.6. Pola Distribusi dan Jalur Perdagangan Bawang Merah

Bawang merah di Kota Pontianak dihasilkan dari Kabupaten Kubu Raya dan di Pulau Jawa. Para produsen sangat tergantung pada pembelian oleh pedagang besar. Komoditas ini selanjutnya akan dipasarkan dan dikirimkan ke pedagang

besar lainnya dan ke eceran oleh para pedagang tersebut. Berikut ini adalah jalur distribusi dari bawang merah di Kota Pontianak:



Gambar 6.6

Rantai Distribusi Bawang Merah

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Kenaikan harga bawang merah lebih disebabkan karena pasokan. Ditingkat petani, harga cenderung ditentukan oleh pengepul/distributor sedangkan di tingkat penjual baik pedagang eceran maupun pedagang besar, kenaikan harga bawang sangat tergantung dari harga supplier. Penetapan harga bawang merah yaitu dengan memproyeksikan keuntungan yang akan diperoleh dan risiko susut dan rusak. Permasalahan pada rantai distribusi bawang merah ras di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Bawang merah tidak berasal dari Kota Pontianak
2. Panjangnya rantai distribusi
3. Beban pengangkutan dari produsen ke pedagang besar
4. Beban penyimpanan di pedagang besar dan pedagang pengecer
5. Risiko kerusakan (rusak dan susut) bawang merah yang cukup tinggi

Berikut ini neraca surplus ketersediaan bawang merah di Kota Pontianak:

Tabel 6.6
Neraca surplus ketersediaan Bawang Merah di Kota Pontianak Tahun 2022

Bulan	Bawang Merah
Januari	54,81
Februari	24,00
Maret	27,83
April	230,75
Mei	137,70
Juni	55,96
Juli	21,57
Agustus	20,88
September	24,35
Oktober	34,61

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Aspek yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pengendalian inflasi dan merupakan kunci dalam pengendalian inflasi di Kota Pontianak yaitu aspek pola perdagangan dan jalur distribusi komoditas. Beberapa kesimpulan dari analisis pola perdagangan dan jalur distribusi komoditas utama penyumbang inflasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Komoditas banyak yang berasal dari daerah lain diluar Kota Pontianak.
2. Kesulitan dalam memenuhi standar syarat izin untuk masuk menjadi pedagang besar pada komoditas ayam atau sapi
3. Rantai distribusi komoditas cukup panjang.
4. Biaya pengangkutan dari daerah lain cukup besar.
5. Beban resiko penyimpanan dan pengemasan bagi komoditas cabai dan bawang.
6. Biaya pemeliharaan komoditas pertanian (cabai, bawang, dll) yang cukup mahal.

7.2 Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan untuk mengendalikan inflasi daerah Kota Pontianak setelah mengetahui pola distribusi pada komoditas pangan adalah:

1. Mendirikan perusahaan umum daerah komoditas pangan untuk mengendalikan harga dan bersaing di perdagangan besar.
2. Membuat aplikasi oleh pemerintah daerah dengan Melaporkan stok secara online oleh distributor agar mudah untuk dipantau dan menjadikan salah satu syarat untuk perpanjangan izin usaha

3. Adanya sinergitas antara dinas terkait seperti dinas pertanian peternakan dan perikanan, disperindagkop, diskominfo dan lain-lain untuk dapat memantau ketersediaan pangan dan pengendalian harga
4. Adanya kerjasama antar daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik 2022. Kota Pontianak Dalam Angka 2022*
- Bank Indonesia 2022. Data Laporan Perekonomian Kalimantan Barat.*
- Boediono. 2001. Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.*
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2009. Basic Econometrics. McGraw-Hill International Edition.*
- Atmadja, Adwin S. 1999. Inflasi Di Indonesia : Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No. 1, Mei 1999 : 54-67.*
- Badan Pusat Statistik. 2021. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kalimantan Barat. Pontianak: Badan Pusat Statistik Pontianak*
- Nopirin. 2009. Ekonomi Moneter. Buku II, Edisi ke-1, Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: BPFE.*
- Priyono, Rahmat dan Endang Setiasih. 2009. Deteksi Faktor Penyebab Inflasi di Purwokerto. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume 10, Nomor 1, April 2009: 65 – 76.*
- Sukirno, Sadono. 2011. Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Jakarta: Rajawali Pers..*